IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BETOYOKAUMAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Persyaratan Memeperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh:
MU'AKIFATUN ISLAHIYAH
NIM. I71216044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

APRIL 2020

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mu'akifatun Islahiyah

NIM : I71216044

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Maret 2020

Yang Menyatakan

Mu'akifatun Islahiyah

NIM. I71216044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MU'AKIFATUN ISLAHIYAH

NIM : I71216044

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul**: "Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik",** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana ilmu politik (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing

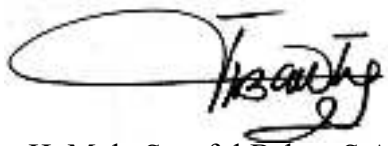

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi oleh Mu'akifatun Islahiyah dengan judul: **"Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 07 April 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I,

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji II,

Holilah, S.Ag, M.Si
NIP. 197610182008012008

Penguji III,

Moh. Ilyas Rolis, S.Ag, M.Si
NIP. 197704182011011007

Penguji IV,

Muchammad Ismail, S.Sos, MA
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 07 April 2020

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Mu'akifatun Islahiyah**
NIM : **I71216044**
Fakultas/Jurusan : **FISIP/Ilmu Politik**
E-mail address : **islahiyah9698@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

"Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juli 2020
Penulis

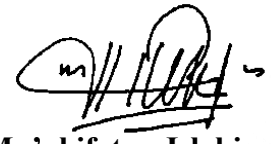

Mu'akifatun Islahiyah
NIM. I71216044

ABSTRAK

Mu'akifatun Islahiyah, 2020, *Implentasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,* "Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya."

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman tidak sesuai aturan serta penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Kelarga Harapan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini didasarkan pada teori Van Metter dan Van Horn, tentang implementasi kebijakan meliputi bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan keputusan kebijaksanaan. Subyek penelitian ini meliputi Dinas Sosial, Perangkat Desa Betoyokauman, Pendamping Program Keluarga Harapan dan Masyarakat Desa Betoyokauman.

Hasil penelitian ini ada tiga : (1) Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat tanggapan yang baik dari sebagian besar masyarakat. Meskipun terdapat beberapa kendala, namun tidak begitu besar dan masih dapat ditemukan solusinya. (2) Realita di lapangan menunjukkan bahwa kendala yang menyebabkan Program Keluarga Harapan tidak sesuai aturan yakni disebabkan oleh dua faktor : yakni komunikasi yang tidak baik antara Dinas Sosial dengan Perangkat Desa terhadap validasi data Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman serta kurangnya controlling dari Dinas Sosial ke Desa Betoyokauman. Dari kedua faktor tersebut, menyebabkan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman masih belum bisa terealisasikan dengan maksimal sesuai dengan Permensos RI No.1 Tahun 2018. (3) Penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman yakni bisa dilihat bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan memiliki penilaian yang positif tentang Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR TABEL xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Definisi Konseptual 15

BAB II : KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu 18
B. Kerangka Teori 27
   1. Teori Kebijakan Publik 27
   2. Pemberdayaan Masyarakat 31
   3. Penanggulangan Kemiskinan 34
   4. Implementasi Kebijakan 41
   5. Program Keluarga Harapan 44

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 51
C. Pemilihan Informan Penelitian 52
D. Teknik Pengumpulan Data 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wawancara 54
2. Dokumentasi 55
E. Teknik Analisis Data 56
1. Pengumpulan Data 57
2. Data Reduksi 57
3. Display Data 58
4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 58
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 59
1. Memperpanjang Masa Penelitian 59
2. Triangulasi 60
G. Sistematika Pembahasan 60

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskriptif Lokasi Penelitian 62
1. Sejarah Desa Betoyokauman 62
2. Letak Geografis dan Data Demografis Desa Betoyokauman 66
a. Geografis Desa Betoyokauman 66
b. Data Demografi Desa Betoyokauman 67
1) Jumlah Penduduk Desa Betoyokauman 67
2) Kemiskinan masyarakat Desa Betoyokauman 68
3) Mata Pencaharian masyarakat Desa Betoyokauman . 69
B. Penyajian dan Analisis Data 70
1. Penyajian Data 70
a. Sejarah Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman . 70
b. Susunan Struktur Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman 74
c. Tahapan Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman 78
1) Tahapan Sosialisasi Program Keluarga Harapan 78
2) Tahapan Verifikasi Pendidikan 81
3) Tahapan Verifikasi Kesehatan 84
4) Tahapan Kesejahteraan Sosial 93
d. Hasil dan Perubahan Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Adanya Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman 95
2. Analisis Data 97
a. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman 99
1) Tahap Pengesahan Proses Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan dalam Peraturan Perundangan 99
2) Pelaksanaan Keputusan Oleh Instansi Pelaksana 110
b. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tidak Sesuai Aturan 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Komunikasi yang Tidak Baik Antara Dinas Sosial dengan Perangkat Desa terhadap Validasi Data Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman . 113
2. Kurangnya Controlling dari Dinas Sosial ke Desa Betoyokauman 116
Dampak Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik..... 119
1) Dampak Nyata Keputusan Baik yang Dikehendaki Maupun Tidak 119
2) Dampak Keputusan Sebagaimana yang Diharapkan Instansi Pelaksana 121
3) Upaya Perbaikan Atas Kebijakan Atau Peraturan Perundangan..... 122
c. Penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.. 125

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 131
B. Saran..... 133

DAFTAR PUSTAKA 135

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

2. Dokumen Lain Yang Relevan

3. Jadwal Penelitian

4. Biodata Peneliti

5. Surat Izin Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kartu Penerima Program Keluarga Harapan..... 71
Gambar 1.2 Program Sosialisasi Prgram Keluarga Harapan 79
Gambar 1.3 Program Verifikasi Kesehatan 86
Gambar 1.4 Program Kesejahteraan Sosial..... 94
Gambar 1.5 Proses Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin 35

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Betoyokauman..... 67

Tabel 1.3 Kemiskinan Masyarakat Desa Betoyokauman 68

Tabel 1.4 Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Betoyokauman.. 70

Tabel 1.5 Indeks Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 73

Tabel 1.6 Struktur Tim Pelaksana PKH Tingkat Pusat Hingga Kabupaten.. 75

Tabel 1.7 Struktur Tim Pelaksana PKH Tingkat Kabupaten Hingga Desa 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang tak pernah habis dalam sejarah kehidupan manusia. Ukuran dan pengertiannya bersifat relatif bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tertentu. Dengan begitu, pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan tidak akan bisa dihapuskan, melainkan hanya bisa dikurangi kadar dan ukurannya, menjadi pendapat yang rasional dan dapat diterima akal sehat.

Relativitas ukuran dan derajat kemiskinan tidak hanya terjadi di lapangan, tidak hanya sebagaimana yang nampak di realitas kehidupan masyarakat, namun juga terjadi pada tataran konseptual-teoritis. Misal, ukuran kemiskinan yang berbeda antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Jika Bank Dunia menetapkan masyarakat miskin pada mereka yang memiliki pengeluaran sebesar USD 1,9 per hari, atau setara dengan Rp. 27.000,-, maka, dalam ukuran Pemerintah Indonesia, mereka yang dianggap miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan kurang dari USD lima (5) perhari atau sekitar USD dua (2) perhari.[2]

[2] Muhtadi Ridwan. *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan,* UIN-Maliki Press. 2012, hal 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia pernah berhasil menekan angka kemiskinan hingga berhasil menjadi salah satu negara maju di Asea Tenggara. Ekonomi Indonesia tumbuh dengan sangat cepat, terutama, ketika stabilitas politik berhasil diciptakan oleh Pemerintah Orde Baru di masa-masa awal pemerintahannya, hingga akhir tahun 80-an. Namun, terjadinya krisis finansial Asia pada tahun 1998 telah memicu ekonomi Indonesia limping dan jatuh, akibatnya, terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga mencapai 24,20%. Lonjakan inflasi dan pemutusan hubungan kerja menjadi pemicu kenaikan angka kemiskinan hingga 1999. Alasan lonjakan inflasi serta melonjaknya angka kemiskinan di batas angka toleransi, telah memaksa Orde Baru dan Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya, setelah 32 tahun memimpin.

Beruntung, sejak era reformasi, presentase penduduk miskin kembali turun. Hingga pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia telah berhasil ditekan kembali ke angka 27,77 juta jiwa atau berkurang jika dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 27,76 juta jiwa. Secara persentase penduduk msikin di Indonesia pada tahun 2017 adalah 10,64% atau terendah sejak 20 tahun terakhir.[3]

Perkembangan terakhir, angka kemiskinan di Indonesia terus menurun. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Angka ini menurun 810 ribu penduduk dibanding periode pada tahun sebelumnya, jika dilihat dari

[33] Meilis Alfista, dengan judul skripsi "*Analisis Tingkat Kemiskinan di Indoneisa"*, Skripsi jurusan ekonomi pembangunan, fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019. Hlm 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persentase penduduk, penduduk miskin hingga tahun 2019 tercatat 9,41 persen atau menurun dibandingkan tahun 2018 yakni 9,82 persen.

Pada dasarnya, kemiskinana adalah problem social yang tak mudah diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Sebab itu, pengertian kemiskinan terus mengalami perkembangan. Banyak pengamat, para tokoh social dan ekonomi yang memiliki perbedaan pandangan terkait definisi kemiskinan. Sebagian menyatakan bahwa kemiskinan adalah satu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya. Masyarakat miskin dinilai adalah mereka yang tak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kelompok orang miskin atau masyarakat miskin, dipercaya memiliki kualitas hidup yang rendah, terutama dalam factor kemampuan mengakses pendidikan dan kesehatan dasar yang baik. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara yang memiliki problem kemiskinan, juga memiliki problem serupa, yaitu kemiskinan dan pengaruh langsungnya pada kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik 2012). Selain penting untuk mendefinisikan kemiskinan, penting juga untuk mendefinisikan konsep Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (Badan Pusat Statistik 2012). Problem kesejahteraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia, tak bisa dilepaskan dari dua konsep utama ini, kemiskinan dan garis kemiskinan.

Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Kartasasmita menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.[4]

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat

[4] Kartasasmita, "*Pembangunan Untuk Rakyat*", Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1996. Hlm 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini dapat menyebabkan meningkatnya beban ketergantungan bagi masyarakat. penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan oleh pemerintah diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.

Hal ini menjadi menarik karena dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH juga sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah dalam bentuk bantuan bersyarat. Ketentuan ini, dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3, berbunyi: "Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial."[5]

[5] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3 Tentang Program Keluarga Harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai makna yakni suatu program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. PKH hadir sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satu tujuan dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Betoyokauman merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, sebagai bentuk pengentasan kemiskinan namun sayangnya, model bantuan semacam ini, tidak memberi kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi lebih banyak.

Di dalam program tersebut, ada beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dimana Bab 1 Ketentuan Umum pasal 5 menerangkan bahwa terdapat beberapa kriteria dan komponen penerima Program Keluarga Harapan diantaranya:[6]

1. Pasal 5 ayat 1 berbunyi:

[6] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 5 Ayat 1-3 Tentang Program Keluarga Harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

a. Ibu hamil/menyusui, dan

b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Pasal 5 ayat 2 berbunyi:

Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat
b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan
d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Pasal 5 ayat 3 berbunyi:

Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Lanjut Usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan

b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Dari peraturan di atas menjadi landasan pemerintah Desa Betoyokauman untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Manyar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif besar dengan jumlah 4367 kepala keluarga,[7] salah satunya adalah wilayah Desa Betoyokauman dengan jumlah kemiskinan 103 kepala keluarga.[8] Hal ini kemudian membuat Desa Betoyokauman yang terdiri dari 4 RW dan 8 RT menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH). Di mana pada Masyarakat miskin di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik penulis menemukan beberapa penyebab yang berkontribusi dalam tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Walaupun, secara data statistik masih belum dipastikan secara matematis, akan tetapi melalui observasi dan wawancara mendalam penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya tingkat kemiskinan di Desa Betoyokauman diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan faktor pendapatan.

Pada tahun 2008 yang lalu, Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menjadi salah satu desa yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan. Bentuk dari Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman yakni berupa uang tunai yang disalurkan melalui rekening pribadi peserta Program Keluarga Harapan dengan tujuan dana tersebut digunakan sesuai dengan 3 komponen, diantaranya :

a. Komponen Kesehatan

[7] Hasil wawancara dengan bapak Riyadi, S.Sos. (Seksi Kesejahteraan Rakyat) Kecamatan Manyar pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 09.15 WIB. di Kantor Kecamatan Manyar
[8] Hasil wawancara dengan bapak Husnul Wafa (Kasi Kesejahteraan) Desa Betoyokauman pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 08.57 WIB. di Kantor Desa Betoyokauman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Komponen Pendidikan

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin di Desa Betoyokauman menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin ada juga yang mengenyam bangku sekolah sambil bekerja karena harus membantu mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Berbagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Betoyokauman, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, terutama bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) perlu ditingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah membangun sarana dan prasana pendidikan dan kesehatan serta meluncurkan program-program yang ditujukan bagi keluarga miskin.

Program Keluarga Harapan merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Program Keluarga Harapan yang mewajibkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) menyekolahkan dan memeriksakan kesehatan anak-anaknya, serta memeriksakan ibu hamil, akan membawa perubahan perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada kurangnya anak usia sekolah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bekerja. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka berada.

Selanjutnya, untuk merealisasikan Program Keluarga Harapan dimaksud, pemerintah Desa Betoyokauman telah berusaha menyesuaikan dengan Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, terutama tentang kriteria dan komponen-komponen dasar hukum calon penerima Program Keluarga Harapan.

Pada awalnya, implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman, sebagaimana didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mendapat respon beragam di masyarakat, sebagian masyarakat desa Betoyokauman pro, mendukung implementasi tersebut dan sebagian yang lain kontra. Dari sudut pandang yang pro dengan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman tersebut mengatakan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan ini masyarakat yang tidak mampu bisa terbantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya terutama dalam hal membiayai anaknya di segi pendidikan. Sedangkan beberapa warga yang kontra dengan adanya implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman sebagaimana didasarkan pada Permensos Republik Indonesia, mengatakan bahwa Program tersebut tidak berjalan semestinya dikarenakan permasalahan dalam hal pemerataan. Permasalahan dalam hal pemerataan tersebut disebabkan oleh dua faktor diantaranya: Pertama, kevalidan data yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan setiap tahun namun selalu mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan setiap tahunnya kondisi perekonomian masyarakat di Desa Betoyokauman berubah-ubah. Kedua, kurangnya controlling dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik terhadap peserta Program Keluarga Harapan. Kedua faktor tersebut merupakan penyebab kesenjangan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman. Padahal sudah jelas, implementasi Program Keluarga Harapan harus didasarkan pada Permensos Republik Indonesia Tahun 2018 dalam pasal 3, namun ada beberapa masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan komponen tersebut tidak mendapatkan hak berdasarkan ketentuan Permensos.

Sebagaimana data yang telah saya peroleh bahwa dari adanya 732 KK di Desa Betoyokauman,[9] terdapat 50 KK yang mendapatkan dana dari Program Keluarga Harapan.[10] Akan tetapi, pada realita di lapangan terdapat 5 orang yang tidak sesuai dengan Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 5 ayat 1-3, namun bisa mendapatkan hak dari Program Keluarga Harapan. Ada pula warga yang sesuai dengan Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 5 ayat 1-3, justru tidak memperoleh hak dari peraturan yang sudah ditetapkan Permensos tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara yang

[9] Data Arsip Jumlah Penduduk Desa Betoyokauman. Tahun 2019
[10] Hasil wawancara dengan ibu Zuriyah (Pendamping PKH) Desa Betoyokauman pada tanggal 27 September 2019 pada pukul 18.45 WIB. dirumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,41%. Begitu juga Kabupaten Gresik yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 12%. Oleh karena itu Program Keluarga Harapan ini penting untuk di implementasikan dengan benar. Maka dari itu penulis ingin mengangkat judul skripsi yang berkaitan dengan judul "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BETOYOKAUMAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai Program Keluarga Harapan maka, peneliti membatasinya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?
3. Bagaimana penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
3. Untuk mengetahui penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengentasan kemiskinan secara umum, serta strategi dan pendekatan yang dapat dinilai efektif dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskian. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan tambahan referensi untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kiritik, masukan serta pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan, terutama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dari kritik dan masukan yang didapat dari penelitian ini, diharapkan implementasi dari program-program pengentasan kemiskinan terutama Program Keluarga Harapan dapat terlaksana lebih efektif dan efisien.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya kepada mahasiswa Prodi Ilmu Politik dan perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi khasanah intelektual, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembelajaran di penelitian-penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Konseptual

1. Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Syaukani, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua,* menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga,* bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah salah satu program nasional yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dengan tujuan membantu masyarakat miskin dalam segi komponen kesehatan, dana pendidikan, dan juga kesejahteraan sosial. Untuk menjalankan dan mengimplementasikan Program Keluarga Harapan tersebut terdapat adanya perkumpulan rutin penerima Program Keluarga Harapan yang telah diarahkan oleh pendamping PKH Kecamatan guna memberikan informasi dan tindak lanjut tentang adanya Program Keluarga Harapan tersebut, terdapat beberapa unsur aktor dari Program Keluarga Harapan diantaranya adalah elemen pemerintahan Desa, pendamping PKH Kecamatan, Pendamping PKH Desa, dan masyarakat Desa Betoyokauman yang telah memperoleh Program Keluarga Harapan.[11]

Pemerintah Kabupaten Gresik juga menjadi pelaksana dari program nasional ini. Program Keluarga Harapan ini telah dinikmati warga miskin di Gresik sejak tahun 2007. Dinas Sosial Kabupaten Gresik dibantu oleh 18 orang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang ada di tiap kecamatan. 154 orang tenaga pendamping Program Keluarga Harapan, 19 tenaga pendamping BPNT, serta para tenaga kesra di setiap desa dan kelurahan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gresik bisa tepat sasaran dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu basis data terpadu penanganan fakir

[11] Hasil wawancara dengan ibu Zuriyah (Pendamping PKH) Desa Betoyokauman pada tanggal 02 Oktober 2019 pada pukul 20.03 WIB. dirumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin dan orang tidak mampu bisa selalu terupdate dengan benar dan program ini dapat berjalan dengan semestinya.

Desa Botoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menjadi salah satu sasaran dari implementasi Program Keluarga Harapan ini. Selanjutnya, untuk merealisasikan Program Keluarga Harapan dimaksud, pemerintah Desa Betoyokauman telah berusaha menyesuaikan dengan Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, terutama tentang kriteria dan komponen-komponen dasar hukum calon penerima Program Keluarga Harapan.

3. Desa Betoyokauman

Desa Betoyokauman merupakan salah satu wilayah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah melaksanakan kegiatan sejak tahun 2008, dan program tersebut masih tetap berjalan hingga sekarang. Letak Desa Betoyokauman berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Desa Betoyokauman memiliki 4 RW. dan 8 RT. Mata pencaharian masyarakat Desa Betoyokauman rata-rata bekerja sebagai petani tambak dan buruh pabrik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu sangat bermanfaat untuk menambah kualitas penelitian ini. Dengan membaca dan menelaah penelitian-penelitian tersebut, peneliti akan dapat memberi nilai tambah, nilai pembeda dan bahkan mungkin juga memberikan nilai kebaruan dalam konteks penelitian sejenis. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini khususnya tentang Program Keluarga Harapan antara lain:

1. Nurfahira Syamsir, dengan judul skripsi "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar"*.

   Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PKH pendidikan dilihat dari tingkat *implemetability* yaitu faktor isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Faktor isi kebijakan masih besar pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan dikarenakan faktor ini erat kaitannya dengan kepentingan implementer sebagai pelaksana kebijakan dan kepentingan dari target group. Sedangkan pada faktor lingkungan kebijakan diatur tentang strategi aktor yang menjadi perimbangan yang penting untuk memudahkan implementasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan. Karena ketika faktor tersebut tidak ada maka yang terjadi justru sebaliknya yaitu *resistensi*. Dengan digulirkan Program Keluarga Harapan ini, telah membuka kesadaran RTSM di Kecamatan Tamalate bahwa miskin itu tidak baik. Kesadaran para RTSM terbukti dengan selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar rajin ke sekolah. PKH pendidikan memberikan dampak besar terhadap akses dan tingkat kehadiran anak-anak dari RTSM di layanan pendidikan. Karena pendamping selalu mengontrol tingkat kehadiran anak-anak di sekolah melalui verifikasi absen yang telah dilakukan oleh guru masing-masing sekolah.[12]

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian dari Nurfahira Syamsir adalah sama-sama membahas mengenai keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan. Sedangkan hal yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian skripsi milik Nurfahira Syamsir adalah pada fokus implementasinya. Penelitian skripsi milik Nurfahira Syamsir lebih fokus ke implementasi PKH dalam bidang pendidikan, yang mana PKH dalam pendidikan tersebut memberikan dampak yang besar terhadap akses dan tingkat kehadiran anak-anak RTSM. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus ke pemerintahan desa terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

[12] Nurfahira Syamsir, dengan judul skripsi "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar"*, Skripsi jurusan ilmu administrasi program studi administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Hasanuddin, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Iqbal Nugraha, dengan judul skripsi *"Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur"*.

Hasil penelitian skripisi ini menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Nugraha ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Timur. Meskipun secara umum penelitian ini telah terlaksana dengak baik, namun masih terdapat berbagai masalah, terutama dalam menentukan Rumah Tangga Miskin (RTS). Problem penentuan RTS yang bermasalah ini diakibatkan oleh sumber data yang tidak akurat, keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data akibat tidak terpenuhinya sebagian prasyarat administratif, serta keterlambatan pelaksanaan verifikasi komitmen akibat kinerja oknum petugas pendamping PKH yang kurang optimal, serta koordinasi antar lembaga pendukung yang belum maksimal.

Terdapat tiga kompenen sebagai Sumber Daya dalam implementasi Program Keluarga Harapan oleh Unit Pelaksana PKH Kabupaten Lampung Timur, yaitu: sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan sumber daya finansial (pendanaan) di mana di masing-masing komponen memiliki kekurangan atau hambatan serta terdapat berbagai solusi teknis maupun nonteknis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan oleh Unit Pelaksana PKH Kabupaten Lampung Timur juga sudah terjalin secara baik hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan baik secara formal (sosialisasi) maupun informal (diskusi) namun dengan intensitas yang kurang. Koordinasi yang belum baik terjadi antar dinas terkait yaitu antara dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Selain itu kurangnya koordinasi antara UPPKH Kabupaten dan PKH Pusat (Kementrian Sosial) dalam transfer data juga menjadi kendala dalam penetapan data (*targeting*) dan pemutahiran data. Untuk struktur birokrasi di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan telah terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas untuk menopang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur baik itu secara internal maupun eksternal. Kondisi lingkungan eksternal dalam pengimplementasian PKH ini dalam arahan pengentasan kemiskinan terlihat sangat mendukung, sehingga tidak ada lagi alasan penentangan dari lingkungan eksternal kebijakan ini. Sikap dari para pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan ini juga sudah dapat dikatakan optimal hal ini dilihat dari sikap penerimaan para pegawai tentang kebijakan yang telah dirumuskan. Meskipun terdapat adanya komponen pendukung yang dirasakan belum memenuhi kebutuhan dalam pengimplementasian kebijakan yaitu kurangnya sumber daya keuangan dalam menjalankan kebijakan tersebut terutama dalam hal fasilitas.[13]

[13] Iqbal Nugraha, dengan judul skripsi "*Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur"*, Skripsi jurusan Ilmu Pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian skripsi milik Iqbal Nugraha adalah sama-sama membahas mengenai implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian skripsi milik Iqbal Nugraha adalah pada fokus utama penelitian. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Iqbal Nugraha lebih memfokuskan ke hambatan proses implementasi dalam PKH yang mana sumber data yang didapat tidak akurat, serta keterlambatan dalam pelaksanaan verifikasi akibat kinerja oknum petugas pendamping PKH yang kurang optimal. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus ke kinerja pemerintahan Desa Betoyokauman dalam menetapkan siapa saja masyarakat miskin yang berhak menerima Program Keluarga Harapan.

3. Nurdiana, dengan judul skripsi *"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa"*.

Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa implementasi pelayanan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, dapat dilihat dari proses sosialisasi hingga distribusi dana PKH yang dilakukan oleh pendamping. Keberhasilan sosialisasi akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan pemerintah, pendistribusian dana PKH kepada peserta Program Keluarga Harapan, dilakukan pula di sekolah-sekolah yang letaknya strategis yang bisa terjangkau oleh penerima PKH. Sedangkan faktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghambat dalam implementasi PKH adalah adanya pendampingan sehingga dana yang digunakan tidak terkontrol apakah digunakan untuk semestinya, lokasi yang harus didampingi yaitu para rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang menjadi peserta program keluarga harapan (PKH) tempat tinggal yang dianggap terlalu jauh dan tidak kejangkau oleh pendamping. Sehingga pendamping mengaku kurang maksimal dalam melakukan pendampingan, pada saat proses penerimaan yang memakan waktu cukup lama, penerimaan dilakukan tiga bulan sekali, kemudian penerima yang banyak sehingga harus mengantri berjam-jam. Serta kecemburuan sosial yang menjadi penghambat berikutnya yaitu, kesulitan membangun komunikasi dan koordinasi untuk dikordinasi oleh kelompok penerima program keluarga harapan (PKH).

Implementasi penelitian sebagai harapan yakni diantaranya perlu adanya evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat sesuai tujuan Program Keluarga Harapan. Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari Program Keluarga Harapan bisa digunakan sesuai ketentuan PKH.[14]

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian skripsi milik Nurdiana adalah sama-sama menunjukkan bahwa berhasilnya implementasi Program Keluarga Harapan bisa dilihat dari pelayanannya. Yang mana salah satu pelayanan yang dimaksud adalah adanya sosialisasi dari pendamping PKH. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian skripsi milik Nurdiana adalah pada kerangka teori. Yang mana penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurdiana membahas tentang teori tentang kebijakan sosial.

4. Helliyah, dengan judul skripsi *"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Masuk Sekolah Di SDN Pajeruan 4 Kec. Kedungdung Kab. Sampang"*.

Hasil penelitian skripisi ini menyimpulkan bahwa implementasi kedisiplinan siswa masuk sekolah di SDN Pajeruan 4 kec. Kedungdung masih sangat rendah sekali sebelum adanya Program Keluarga Harapan, setalah adanya Program Keluarga Harapan kedisiplinan di SDN Pajeruan 4 kedisiplinan siswa masuk sekolah semakin meningkat. Karena dalam program ini ada pemberian sanksi terhadap mereka yang tidak memenuhi kehadiran kurang dari 85%. Dalam pelaksanaan program ini, pendamping Program Keluarga Harapan dan kepala sekolah, serta dewan guru menjadi

[14] Nurdiana, dengan judul skripsi "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa"*, Skripsi jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, fakultas dakwah dan kounikasi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motivator bagi anak-anak yang mendapatkan bantuan dari adanya Program Keluarga Harapan, mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kedisiplinan siswa masuk sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya dari adanya Program Keluarga Harapan ini juga sangat efektif untuk memotivasi siswa yang tidak masuk sekolah, ini terlihat dari jumlah siswa pada tahun ajaran 2013-2014 meningkat sangat pesat, peningkatannya sampai 100% siswa yang masuk di SDN Pajeruan 4.

Jadi kedisiplinan masuk sekolah di SDN Pajeruan 4 terbangun bukan karena kesadaran dari siswa itu sendiri, melainkan karena adanya sanksi bagi mereka ketika mereka tidak disiplin. Adapun implementasi Program Keluarga Harapan yang diterapkan di SDN Pajeruan 4 melalui beberapa tahapan. Didalam program ini, pendamping PKH adalah pelaksana dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan. Fungsi utama mereka yaitu membantu RTSM untuk menyuarakan aspirasi mereka. Adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh pendamping dalam program ini adalah: 1) melakukan pertemuan awal. 2) membantu mendaftarkan anak masuk sekolah. 3) melakukan kunjungan kepada peserta PKH. 4) melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. 5) melakukan monitoring ke sekolah. Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh siswa yang menerima bantuan ini yaitu membantu perekonomian siswa dan meningkatkan kedisiplinan siswa masuk sekolah. Sedangkan manfaat yang didapat dari sekolah yaitu membantu masalah utama pihak sekolah yaitu mendisiplinkan siswa-siswinya yang sering melanggar aturan-aturan sekolah. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor yang mendukung implementasi Program Keluarga Karapan adalah pemerintah, adapun juga dari dukungan tokoh masyarakat setempat khususnya kepala sekolah SDN Pajeruan 4. Sedangkan faktor penghambat dari program ini ialah mengenai bahasa, banyak dari orang tua siswa yang tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga komunikasi masih kurang berjalan efektif. Kemudian juga akses jalan yang kurang memadai.[15]

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian dari Helliyah adalah sama-sama membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan milik Helliyah tersebut adalah implementasi dalam meningkatkan kedisiplinan siswa masuk sekolah. Pendukung dari adanya program ini diantaranya pendamping keluarga harapan dan kepala sekolah, serta dewan guru yang menjadi motivator bagi anak-anak yang mendapatkan bantuan dari adanya Program Keluarga Harapan. Sedangkan dalam penelitian ini pendukung dari adanya program keluarga harapan adalah pemerintahan desa, pendamping program keluarga harapan dan masyarakat yang memperoleh program keluarga harapan.

[15] Helliyah, dengan judul skripsi *"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Masuk Sekolah Di SDN Pajeruan 4 Kec. Kedungdung Kab. Sampang"."*, Skripsi jurusan kependidikan islam, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, IAIN Sunan Ampel, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan public merupakan studi tentang "bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah"[16]. Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat demi mencapai tujuan bersama.

Dari sekilas uraian di atas para ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai kebijakan publik, antara lain :

Pendapat pertama, menurut Dye *(dalam buku public policy)* mendefinisikan kebijakan publik adalah :

> "studi tentang "apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama

[16] Wayne Parsons, "*Public Policy*: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan", Jakarta: Prenadamedia Group, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama".[17]

Pendapat kedua, menurut Eystone dalam bukunya Solichin Abdul Wahab, yang menyatakan bahwa[18]:

> "Yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah "*the relationship of governmental unit to its environment*" (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya)".

Pendapat ketiga, menurut Pakar Inggris, W.I. Jenkins dalam bukunya Solichin Abdul Wahab, yang menyatakan bahwa[19]:

> "*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut)".

Pendapat keempat, menurut Pakar Prancis, Lemieux dalam bukunya Solichin Abdul Wahab, yang menyatakan bahwa[20]:

> "*The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time*" (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di

[17] Ibid. Hlm 3
[18] Solichin Abdul Wahab, *"Analisis Kebijakan",* Jakarta: PT Bumi Aksara ED.1, Cet.6, 2017. Hlm. 13
[19] Ibid. Hlm. 15
[20] Ibid. Hlm. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu)".

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah: serangkain tindakan yang dilakukan oleh Negara yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh Negara dalam rangka memecahkan masalah tertentu.

Islamy mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara (*public policy*), yaitu:

a) Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
b) Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c) Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
d) Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat.[21]

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah

[21] Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani. "*Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik"*. Jurnal Review Politik. Volume 6 No.2 Thn. 2016. Hlm 198-199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, maka melalui tahapan yang cukup panjang. Thomas R.Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya:

1. Identifikasi masalah kebijakan: produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.
2. Penyusunan agenda: memilih masalah atau isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.
3. Perumusan kebijakan: masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada.
4. Implementasi kebijakan: tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan.
5. Evaluasi kebijakan[22]: pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang berupa penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris

[22] Ibid. Hlm.199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang efek dari kebijakan dan program terhadap target dari tujuan yang diinginkan.

Dari uraian dan penjelasan tentang kebijakan publik ini, PKH sebagai sebuah upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan kesejahteraan untuk masyarakat merupakan sebuah kebijakan publik.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan yang mengutamakan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.[23] Dalam terminologi ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak pernah punah. Tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hubungan tujuan ekonomi dan tujuan sosial dapat direalisasikan jika didukung oleh empat kebijakan ekonomi:

1. Intervensi pemerintah secara terarah
2. Pemerataan pendapatan
3. Penciptaan kesempatan kerja
4. Pemberian subsidi bagi kegiatan pembangunan yang diperlukan.[24]

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses serta upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan dan juga kemampuan kepada individu serta masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis,

[23] Faizal, "*Diskursus Pemberdayaan Masyarakat"*, Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung. Volume 8 No. 1 Thn. 2015. Hlm 35
[24] Ibid. Hlm. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi sekaligus memilih alternatif dalam memecahkan suatu masalah dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan kemampuan yang dimiliki. Karena tujuan dari pemberdayaan yakni dengan terbentuknya individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.[25]

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah sama dengan pembangunan masyarakat yang berkembang, diantaranya:

1. Pendekatan kepada masyarakat secara menyeluruh
2. Pendekatan berdasarkan kemandirian
3. Pendekatan guna memecahkan masalah tertentu
4. Pendekatan demonstratif
5. Pendekatan eksperimental
6. Pendekatan konflik kekuasaan.

Memberdayakan masyarakat bukan sekedar memobilisasi masyarakat untuk ambil bagian, melainkan mengejar jaringan kemitraan.

[25] Ambar Teguh Sulistiyani, *"Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan"*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fokus pemberdayaan masyarakat berorientasi pada keluarga, pemberdayaan ini berisikan:

1. Membangun kapasitas internal keluarga (pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sebagainya)
2. Mengubah kepercayaan dan prilaku yang menghambat kemajuan (perkawinan usia dini, pelanggaran disiplin, dan kriminalitas)
3. Memperkuat nilai-nilai tradisional yang kondusif untuk pembangunan (gotong royong, rasa hormat), dan penyaringan nilai-nilai baru. Strategi pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta membangun kemitraan perlu didasarkan pada hal-hal berikut:
    a) Analisis yang jelas tentang situasi masyarakat yang akan diberdayakan
    b) Pemilihan kelompok sasaran yang seksama, dengan mereka akan dikembangkan kemitraan untuk menjamin tidak memilih mereka yang telah diberdayakan
    c) Mekanisme dibentuk untuk menjamin keterlibatan anggota masyarakat yang tersisih (kelompok marjinal), misalnya kuota keanggotaan wanita dalam lembaga pembangunan setempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Unit-unit organisasi lokal yang ada disesuaikan untuk mewadai agar ikut dalam proses penciptaan struktur-struktur baru.

Proses pemberdayaan masyarakat *(community empowerment)* merupakan upaya membantu mayarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan *(power),* aksesibilitas terhadap sumber daya dan lingkungan yang akomodatif. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan secara partisipatif kiranya sangat sesuai dan dapat dipakai untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat beserta lingkungan strategisnya. Sebagai konsep dasar pembangunan partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat mampu untuk berkembang dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri, berkesinambungan dan berkelanjutan.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sulit dipecahkan dan menjadi masalah utama pemerintah Indonesia mulai dari pemerintah Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Berbagai strategi dan pendekatan telah diimplementasikan untuk menghapus kemiskinan, namun sampai saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini data masih menunjukkan adanya pasang surut kondisi kemiskinan masyarakat miskin. Meskipun demikian, tidaklah kemudian hal tersebut menjadi sebuah alasan untuk membiarkan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.[26]

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 1970-2019.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Prosentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1970	n.a	n.a	70,00	n.a	n.a	60,00
1976	10,00	44,20	54,20	38,80	40,40	40,10
1978	8,30	38,90	47,20	30,80	33,40	33,30
1980	9,50	32,80	42,30	29,00	28,40	28,60
1981	9,30	31,30	40,60	28,10	26,50	26,90
1984	9,30	25,70	35,00	23,10	21,20	21,60
1987	9,70	20,30	30,00	20,10	16,10	17,40

[26] Sri Widayanti, "*Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis"*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 1 No. 1 Thn. 2012. Hlm 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1990	9,40	17,80	27,20	16,80	14,30	15,10
1993	8,70	17,20	25,90	13,40	13,80	13,70
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,20
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,31	26,43	38,74	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41
2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,10	18,20
2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42
2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49
September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96
September 2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66
Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37
September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47
Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25
September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22
September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13
Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86
September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70
Maret 2017	10,69	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64
Septemb	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

er 2017						
Maret 2018	-	-	25,94	-	-	9,82
Septemb er 2018	10,13	15,54	25,67	6,89	13,10	9,66
Maret 2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41

*(**Sumber :** Diolah oleh peneliti dari data Badan Pusat Statistik, 2019)*

Dalam teori ekonomi mengatakan, bahwa untuk memutuskan rantai kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, mengembangkan teknologi dan juga penambahan modal investasi. Program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antarnegara, memperbaiki kondisi pemukiman perkotaan dan pedesaan, perluasan kesempatan pekerjaan serta pendidikan untuk para pemuda, pelatihan keterampilan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin usia lanjut. Selain program dari pemerintah, kalangan masyarakat juga ikut terlibat dalam membantu masyarakat miskin melalui organisasi kemasyarakatan, gereja, dan sebagainya. Sedangkan di negara Indonesia dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan juga hampir sama seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, namun tingkat penanganan kemiskinan di Indonesia belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komprehensif karena penanganan kemiskinan di Indonesia masih didominasi sektor ekonomi saja, belum menyentuh aspek lain seperti sosial, budaya, hukum dan politik, bahkan agama.[27]

Pembahasan mengenai kemiskinan dan berbagai hal yang berkaitan dengannya mulai dari penyebab, penanggulangan dan caranya tidak akan ada habisnya. Berbagai pendapat yang menyatakan bahwa jumlah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya cukup untuk melepaskan rakyatnya dari masalah kemiskinan, serta mensejahterakan mereka. Dengan seluruh kekayaan dan potensi yang dimiliki, seharusnya masyarakat Indonesia bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Namun, kondisi masyarakat sangat berbeda dengan apa yang diharapkan. Hingga saat ini, kemiskinan justru merupakan masalah utama di tengah-tengah potensi dan kekayaan alam yang berlimpah itu.[28]

Adapun strategi yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, diantaranya:

1. Program pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanya memprioritaskan dari aspek ekonominya saja, melainkan tetap harus memperhatikan dari aspek lain. Pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus

[27] Nano Prawoto, "*Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya"*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 No. 1 Thn. 2009. Hlm 64

[28] Ambar Teguh Sulistiyani, *"Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan"*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004

[28] Sri Widayanti, "*Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis"*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 1 No. 1 Thn. 2012. Hlm 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengejar target dalam mengatasi kemiskinan non ekonomi. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, dan sebagainya. Jika budaya tersebut tidak dihilangkan, maka kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi.

2. Meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, informasi pasar, serta perluasan jaringan kerja.
3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian yang dipelopori oleh pakar dan aktivis LSM, menegaskan, bahwa masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.[29]

[29] Nano Prawoto, "*Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya"*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 No. 1 Thn. 2009. Hlm 64-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam bukunya Wayne Parsons yang berjudul *Public Policy* mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan seperti telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.[30]

Implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. Realita menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks.[31]

Ada beberapa cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, meng-kombinasi atau mensinergikan, dan mengembangkan pandapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan

[30] Wayne Parsons, "*Public Policy*: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan", Jakarta: Prenadamedia Group, 2001. Hlm 463
[31] Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A, *"Analisis Kebijakan",* Jakarta: PT Bumi Aksara ED.1, Cet.6, 2017. Hlm. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementor bersama kelompok sasaran kebijakan minimal berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya.

Mengacu pada pendapat Edward III dalam jurnalnya Haedar Akib mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Komunikasi : suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Sumber daya : meliputi empat komponen yaitu
    a. Staf yang cukup (jumlah dan mutu)
    b. Informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan
    c. Kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
    d. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program
3. Sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi : didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tata aliran kerja birokrasi.[32]

Dalam praktek di lapangan, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan intansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.[33]

Implementasi Kebijakan menurut Quade dalam jurnalnya Haedar Aqib adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

[32] Haedar Akib, *"Implementasi Kebijakan",* Guru besar ilmu administrasi Universitas Negeri Makassar. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Hlm 5-6
[33] Deddy Mulyadi, "*Studi kebijakan publik dan pelayanan publik"*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu diantaranya:

1. Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan.
2. Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan.
4. Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.[34]

5. Program Keluarga Harapan (PKH)

A. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang disingkat dengan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi

[34] Haedar Akib, *"Implementasi Kebijakan",* Guru besar ilmu administrasi Universitas Negeri Makassar. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Hlm 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[35]

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan berada dibawah TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.

B. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH bertujuan:

1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.[36]

[35] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 Tentang Program Keluarga Harapan.
[36] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Tentang Program Keluarga Harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sasaran Penerima Bantuan Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.[37]

Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.[38]

PKH akses sebagaimana dimaksud pada pernyataan diatas yakni terdiri atas wilayah:

1) Pesisir dan pulau kecil
2) Daerah tertinggal/terpencil, atau
3) Perbatasan antar negara.[39]

D. Syarat dan Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
   a) Ibu hamil/menyusui, dan
   b) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

[37] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3 Tentang Program Keluarga Harapan.
[38] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 4 Ayat 1 Tentang Program Keluarga Harapan.
[39] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 4 Ayat 2 Tentang Program Keluarga Harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
   a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat
   b) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
   c) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan
   d) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
   a) Lanjut Usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan
   b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.[40]

E. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berhak mendapatkan :

1) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
2) Pendampingan Program Keluarga Harapan
3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial, dan

[40] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 5 Ayat 1,2,3 Tentang Program Keluarga Harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berkewajiban untuk:

1) Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2) Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan
3) Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:

1) Kesehatan dengan ketentuan:
    a) Memberikan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas.
    b) Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif, dan

c) Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

2) Pendidikan dengan ketentuan : harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar ketrampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3) Kesejahteraan sosial dengan ketentuan :

a) Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan

b) Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.[41]

[41] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab II Hak dan Kewajiban Tentang Program Keluarga Harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif. Whitney yang dikutip Muh Khalifah Mustamin berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpensi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu.[42] Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambar seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.[43] Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti. Sehingga tujuan pemilihan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan mengungkap makna dari setiap fenomena Program

[42] Muh. Khalifah Mustamin, *Metodologi Peneliian Pendidikan,* (Makasaar: Alauddin Press 2009), hlm. 19.
[43] Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Harapan menurut persepsi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gresik maupun dengan dukungan teoretik yang dibangun dalam kerangka pikir.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian ini di lakukan pada tempat dan waktu antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai lokasi utama dalam penelitian ini, karena alasan substansi persoalan, yaitu karena adanya kesalahan dalam implementasi Program Keluarga Harapan, terutama pada kesalahan menentukan pihak-pihak penerima. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi daerah tersebut yang mana di Desa Betoyokauman sendiri hanya terdapat 50 Kepala Keluarga yang memperoleh Program Keluarga Harapan dari 725 Kepala Keluarga. Namun dari 50 Kepala Keluarga tersebut terdapat 6 orang (kurang lebih 10%) yang telah memperoleh Program Keluarga Harapan namun tidak sesuai dengan aturan, terutama pada kriteria penerima yang sudah ditentukan.[44] Jika sesuai aturan yang ada, ke enam orang tersebut seharusnya tidak berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan. Sedangkan di saat yang sama, terdapat enam

[44] Hasil wawancara dengan ibu Zuriyah (Pendamping PKH) Desa Betoyokauman pada tanggal 27 September 2019 pada pukul 18.45 WIB. dirumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain yang seharusnya berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan, namun justru tidak mendapatkan haknya.

Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan untuk meneliti mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut akan di laksanakan selama tiga bulan yaitu mulai awal bulan Januari 2020 sampai akhir bulan Maret 2020.

C. Pemilihan Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi dan dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.[45] Informan penelitian ialah sumber informasi dan data serta masukan-masukan dalam menjawab masalah penelitian. Maka informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat atau memiliki pemahaman yang mendalam menganai Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

[45] Tatang Amirin, *"Menyusun Rencana Penelitian"* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

No	Nama	Alamat Informan	Status Informan
1.	Diana Triratna Ningtyas, S.Psi	Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik	Dinas Sosial Kabupaten Gresik
2.	Dhina Mardiana, S.H., M.KN	Jl. Raya Meduran No. 91 Manyar	Pendamping PKH Kecamatan
3.	Ibu Zuriyah	Desa Betoyokauman RT 03 RW 02	Pendamping PKH Desa
4.	Bapak H. M. Ali Mansur	Desa Betoyokauman RT 02 RW 01	Kepala Desa Betoyokauman
5.	Bapak Ahmad Khulaluddin	Desa Betoyokauman RT 01 RW 01	Bendahara Desa Betoyokauman
6.	Bapak Husnul Wafa	Desa Betoyokauman RT 01 RW 04	Bidang Kesejahteraan Desa Betoyokauman
7.	Ibu Muya	Desa Betoyokauman RT 01 RW 03	Masyarakat penerima PKH
8.	Ibu Ninik Zulaikha	Desa Betoyokauman RT 01 RW 01	Masyarakat penerima PKH
9.	Ibu Sulaturrohmi	Desa Betoyokauman RT 01 RW 03	Masyarakat penerima PKH
10.	Ibu Sofiyah	Desa Betoyokauman RT 02 RW 02	Masyarakat yang tidak memperoleh PKH namun mereka termasuk dasar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Program Keluarga Harapan

*(**Sumber :** Diolah oleh peneliti dari data masyarakat Desa Betoyokauman, 2020)*

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terkait penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai variabel yang akan diteliti. Data yang didapatkan peneliti berupa: rekaman hasil wawancara dengan informan, catatan-catatan yang tertulis pada buku peneliti, serta dokumentasi data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena benar tidaknya suatu data bergantung pada teknik pengumpulan data yang nantinya berupa foto. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara[46]

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Karena dengan penelitian ini proses wawancara dapat bersifat flexibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan tetapi tetap ada pedoman awal wawancara sebagai acuan agar proses wawancara dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.[47]

Sedangkan menurut Esterberg dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara merupakan sebuah komunikasi verbal

[46] Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja, 2006), hlm. 98
[47] Ibid, hlm. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan sebuah data yang ingin di cari.[48] Sehingga akan diketahui kondisi bagaimana Implementasian Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Informan yang dipilih merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam, mengatahui informasi yang diperlukan, dan berhubungan dengan kasus penelitian.

Peneliti langsung turun ke lapangan dengan cara peneliti mendatangi rumah informan dan melakukan tanya jawab di rumah informan, sehingga informan lebih rilex dan leluasa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen adalah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[49] Dalam buku sugiyono, Moleong juga memberikan beberapa manfaat dokumentasi yang berguna untuk penelitian kualitatif diantaranya:

1) Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong pencarian data lain
2) Sebagai bukti untuk peneliti

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development,* (Bandung, Alfabeta, 2007), hlm 231
[49] Ibid. hlm 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dokumentasi yang sifatnya alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan masih berada dalam konteks
4) Relative murah dan mudah di dapatkan
5) Hasil pengkajian isi dokumentasi akan membuka kesempatan untuk lebih mendalami obyek yang di teliti.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang informan melalui dokumen tentang Implementasi Program Keluarga Harapan yang ditulis atau dibuat langsung oleh informan yang paham dan terlibat langsung dalam program tersebut. Dalam hal ini diperlukan guna melengkapi hal-hal yang dirasa belum cukup dalam data-data yang diperoleh.[50]

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data sudah terkumpul dan sudah ada di tangan penulis, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data yang ada kemudian di analisis. Analisa data merupakan suatu komponen yang penting dalam penelitian ini, analisa data juga mengungkapkan hasil-hasil data yang sudah diperoleh dalam menjawab pertanyaan penelitian. Analisa data sebenarnya adalah suatu proses kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih muda dibaca dan diinterpresentasikan.[51]

---

[50] Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 144
[51] Darsono Wisadirana, *Metode Penelitian & Pedoman Penulisan Skripsi :Untuk Ilmu Sosial,* (Malang: UMM Press, 2005), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun langkah teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan proses pengumpulan data sebagai mana teknik pengumpulan data yang telah di tentukan diatas. Proses pengumpulan data haruslah melibatkan sisi aktor yang terlibat (Informan/Narasumber), aktivitas, latar atau konteks terjadinya peristiwa. Peneliti tidak akan hanya terikat pada kata- kata melainkan dengan segala sesuatu yang diperoleh dari yang dilihat, didengar dan diamati. Dengan demikian data dapat berupa catatan lapangan sebagai hasil pengamatan, deskripsi wawancara, foto pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, riwayat hidup, surat- surat dan simbol- simbol yang melekat dan dimiliki.

b. Data Reduksi

Data reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis dari lapangan.[52] Berbeda dengan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dimana data yang harus sebanyak mungkin terkumpul semua hingga dapat diproses lebih lanjut menjadi analisis. Dalam penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif ini data yang terkumpul meskipun sedikit sudah dapat dianalisis. Peneliti melakukan tahapan reduksi data yang merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan- pilihan peneliti tentang bagian mana yang di

[52] Muhammad Idrus, *"Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif"*. (Jakarta : Erlangga, 2009). Hal. 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buang, data apa yang dapat lebih dikembangkan merupakan pilihan-pilihan yang analistis. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, mengarahka dan membuang bagian data yang tidak diperlukan. Peneliti dalam hal ini tidak akan terburu- buru dalam membuang data yang tidak diperlukan karena mungkin saja data tersebut dapat digunakan untuk tema-tema penelitian yang relevan lainnya.

c. Display Data

Berikutnya ialah penyajian data yang mana proses ini adalah kegiatan- kegiatan yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu antara proses reduksi datan dan penyajian data dapat berlangsng selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sampai kesimpulan yang penelitian disusun sehingga peneliti tidak terburu- buru sampai proses *display* data benar- benar sudah dilakukan dan hasil dari penelitian sudah dipaparkan. Peneliti melakukan tahap *display* data saat data yang direduksi sudah didapatkan.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan terakhir ini, peneliti akan melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan yang merupakan tahapan akhir dari teknik analisis data. Proses ini juga berarti penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapatt dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk tema yang sama dan pola- pola yang sama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelompokan dan pencarian kasus- kasus yang khas dan mungkin berbeda dari yang lainnya.

Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti melakukan proses penarikan kesimpulan seiring berjalannya penelitian namun kesimpulan yang dibuat bukanlah kesimpilan yang terakhir. Karena dalam penarikan kesimpulan, peneliti melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali dilapangan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara selintas dengan mengingat temuan- temuan terdahulu dan melakukan *ceklist*.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas dan reliabel data merupakan syarat mutlak bagi peneliti dalam melakukan analisis data. Objektivitas penelitian dapat dilihat dari validitas dan reliabelitas data yang diperoleh. Agar validitas data dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif dapat terpenuhi, dapat dilakukan dengan cara:

a. Memperpanjang Masa Penelitian

Perpanjangan masa penelitian yang dimaksud yaitu melakukan pendekatan yang lebih intens dan menyeluruh terhadap informan. Perpanjangan waktu antara peneliti dengan subjek yang diteliti dimaksudkan untuk menghindarkan penelitian dari bias kereaktifan. Sehingga terjadi *miss* komunikasi atau kesalapahaman pengertian antara peneliti dengan informan. Bias tersebut biasanya sering terjadi pada saat awal penelitian karena antara peneliti dan subjek yang diteliti terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan sudut pandang.[53] Peneliti memperpanjang waktu sampai data yang telah diperoleh telah teruji kebenarannya dan bukan kebohongan belaka.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi merupakan cara yang digunakan untuk melakukan pengecekan data dari beberapa sumber. Selain itu triangulasi dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pengumpulan dokumentasi. Triangulasi digunakan dengan tujuan untuk menyelidiki keabsahan dan validitas data dari penelitian. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber dapat dipastikan teknik ini dapat mencegah dari adanya subyektifitas peneliti. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan sumber informan atau narasumber lebih dari satu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari keberpihakan peneliti dalam penelitian selain itu juga untuk meningkatkan keabsahan dan validitas dari data yang di peroleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari ketidak beraturan pembahasan dalam laporan penelitian ini, dan demi fokusnya pemikiran serta pemecahan pokok permasalahan agar lebih teratur, hasil penelitian disusun dalam suatu sistematika penelitian. Sistematika penelitian ini diuraikan menjadi beberapa

[53] Haris Herdiansyah, *"Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu- Ilmu Sosial"*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2010). Hal. 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab dan sub bab yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain untuk memudahkan penelitian serta memudahkan pembaca untuk memahami secara runtut. Adapun sistematika penelitian terdiri dari lima bab, diantaranya:

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teoritis yaitu teori dan konsep, hipotesis dan metodologi penelitian.

Bab II. Menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian, definisi konseptual yaitu menjelaskan tentang konsep dasar dan pengertian yang menjadi topik penelitian. Bab ini juga berisi tentang kerangka berpikir yaitu konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian.

Bab III. Menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan pada saat kegiatan penelitian lakukan dilapangan seperti: 1) Jenis dan pendekatan penelitian, 2) Lokasi dan waktu penelitian, 3) Tahap-tahap penelitian, 4) Teknik pengumpulan data, 5) Teknik analisis data, 6) Teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV. Pada Sub bab ini akan menguraikan tentang: 1) Deskripsi umum subyek penelitian, 2) Deskripsi hasil penelitian, 3) Analisis data.

Bab V. Bagian ini adalah bagian akhir yaitu bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1) Sejarah Desa Betoyokauman

Kyai Darmo Pipiyudo merupakan pendatang yang pertama masuk ke daerah sebelah barat Manyar. Daerah itu belum dihuni banyak penduduk. Hanya ada beberapa rumah dan dikelilingi rawa-rawa. Bila dilihat dari luar, daerah itu seperti hamparan rawa luas yang ditumbui rerumputan dan ilalang yang menjulang. Orang tidak menyangka bahwa di tengah-tengahnya terdapat pemukiman penduduk. Kyai Darmo Pipiyudo berasal dari kota suci Makkah, ia meninggalkan Negaranya dan mengembara demi menyebarkan agama Islam.

Kyai Darmo Pipiyudo dituakan dan ditokohkan di daerah itu karena ia satu-satunya pendatang pertama dan yang paling tua umurnya di antara pendatang lainnya. Ia sangat disegani dan dihormati oleh penduduk setempat. Apapun yang dikatakannya, penduduk setempat selalu mematuhinya.

Daerah itu tidak ada yang memimpin karena pemimpinnya meninggal dunia. Atas saran Kyai Darmo selaku orang yang dituakan di daerah itu akan diadakan pemilihan pemimpin yang baru. Papan pengumuman sudah tersebar di mana-mana bahwa akan diadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan pemimpin daerah itu. Semua penduduk boleh mencalonkan diri, baik penduduk asli maupun penduduk pendatang dari daerah lain.

Suatu hari Sunan Giri Gresik pulang dari pengembaraan dan sampai di daerah Pedurungan. Ia diikuti santrinya. Di daerah itu santrinya kehausan. Mereka tidak menemukan air tawar yang dapat diminum. Santri-santrinya diutus mencari air di sekitar daerah itu namun tidak menemukan. Di daerah itu airnya asin semua sehingga tidak bisa diminum. Melihat santrinya sudah tidak kuat lagi menahan rasa laparnya, Sunan Giri menancapkan tongkatnya ke tanah. Bekas tancapan tongkat itu mengeluarkan sumber air tawar. Para santrinya sangat senang melihat air tawar itu. Mereka segera mengambil air dan meminumnya untuk menghilangkan rasa dahaganya. Sumber air itu menjadi sebuah sumur dan berada di tengah-tengan pasar Pedurungan. Setelah puas mengisi perutnya dengan air tawar dan jernih itu, rombongan Sunan Giri meneruskan perjalanan menuju ke selatan sampai di daerah Tambak Brekat. Terik matahari menguras air yang ditampung di perut mereka. Sengatan matahari itu menyebabkan kerongkongan mereka kering kerontang lagi. Mereka merasa haus. Mereka mencari sumber air tawar di daerah itu tidak menemukan. Mereka menghadap kepada Sunan Giri dan melaporkan jika di tempat itu tidak ditemukan sumber air tawar yang bisa diminum padahal rasa haus mereka sudah tidak bisa ditahan lagi. Sunan Giri mengangkat tongkat yang dipegang di tangan kanannya dan menamcapkan ke tanah. Tongkat itu dengan mudahnya masuk ke tanah dan membekas, menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah lubang. Semakin lama, lubang tersebut membesar dan akhirnya menjadi sebuah sumur yang mengeluarkan air tawar yang jernih. Santri Sunan Giri segera mengambil air dan minum sepuas-puasnya.

Rombongan itu meneruskan perjalanan ke arah timur setelah beristirahat beberapa saat di daerah Tambak Brekat. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan itu di bawah panasnya matahari yang membakar kulit. Rombongan itu sudah jauh meninggalkan daerah Tambak Brekat. Di tengah perjalanan salah seorang santri menderita sakit. Ia mengalami kecapekan selama dalam perjalanan. Santri yang sakit itu minta minum karena kehausan. Sunan Giri menyuruh salah seorang untuk mencari air di sekitar daerah itu. Sayang, mereka tidak menemukan sumber air tawar di sekitar daerah itu. Sunan Giri menggunakan tongkatnya kembali untuk membuat sumber air sebagaimana yang dilakukan saat di Pedurungan dan Tambak Brekat. Diangkatnya tongkat di tangan dan ditancapkan ke tanah. Setelah tongkat itu dicabut tak setetespun air yang keluar. Santri yang memperhatikan dan menunggu keajaiban sebagaimana yang mereka alami sebelumnya tidak terjadi. Mereka merasa heran. Sunan Giri kembali menancapkan tongkat ke tanah untuk kali kedua namun air tak kunjung keluar dari tanah tersebut. Mereka merasa lebih heran lagi mengapa tidak seperti sebelumnya hanya dengan sekali tancap langsung keluar sumber air dengan deras. Sunan Giri mengulanginya sampai ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedepalan, dan kesembilan. Hasilnya nihil tidak ada sumber air yang keluar dari tanah bekas tancapan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Santri-santriku, rupanya Allah menguji kesabaran kita” kata Sunan Giri.”Kita harus tabah terhadap ujian yang diberikan Allah kepada kita” tambahnya. Para santrinya yang mendengar tidak menjawab sepatah kata pun hanya menganggukkan kepala. “Pergilah kamu mengabil air tawar untuk temanmu yang sakit ini di tempat yang ada sumber air tawarnya itu” kata Sunan Giri sambil menunjuk daerah yang baru saja ditinggalkannya. “Dengan apa saya harus membawa air itu Kanjeng Sunan?”tanya santri yang ditunjuk. Sunan Giri belum sempat menjawab, santri itu telah buru-buru pergi.

Sunan Giri memandangi santrinya yang pergi mencari air. Ia senang sekali melihat santrinya sudah datang, nampak menuju ke arahnya. Santri itu berjalan semakin mendekati Sunan Giri. “Kowe ini nggowo opo?” tanya Sunan Giri kepada santrinya yang datang dengan kedua tangannya membawa belahan buah kelapa. “Beto toyo, Kanjeng Sunan”. Atas peristiwa tersebut daerah itu dinamai Betoyo.

Sunan Giri mengambil belahan buah kelapa yang berisi air itu dan diminumkan kepada santrinya yang sakit dan mengaduh kehausan. Santri meminum air itu. Air itu membawasi tenggorokannya yang kering. Rasanya seperti minum air bercampur es. “Alhamdulillah, terima kasih sobat kamu telah bersusah payah mengambil air untukku” katanya pelan. “Maafkan segala kesalahanku. Rasa-rasanya umurku sudah tidak akan lama lagi. Asyhadu an la ilaha illallah waasyhadu anna Muhammadar rasulullah” ujar santri itu setelah minum air itu. “Inna lillahi wa inna ilaihi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rajiun" terdengar dari Sunan Giri dan santrinya. Santri itu meninggal dunia di tempat itu yang kini bernama Betoyo. Sunan Guru dan santrinya dibantu penduduk setempat merawat jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, menshalati, hingga menguburtkan. Santri itu dimakamkan di Betoyo. Pemakaman tempat santri itu dinamakan makam Sawo. Pada saat itu Kyai Darmo Pipiyudo sudah meninggal dunia. Ia disemayamkan di makam yang berada di tengah-tengah desa. Penduduk desa menyebut makam Kyai Darmo Pipiyudo itu dengan sebutan Makam Buyut Deso. Makam Kyai Darmo Pipiyudo banyak diziarahi peziarah terutama pada malam-malam ganjil sepuluh hari akhir bulan Ramadhan. Kemudian asal mula Desa Betoyokauman adalah jadi satu Desa dengan Desa Betoyoguci. Pada Zaman dulu Desa Betoyo di pimpin oleh lima kepala Desa. Akhirnya Betoyo dijadikan Dua sampai sekarang yaitu, Betoyoguci dan Betoyokauman.[54]

2) Letak Geografis dan Data Demografis Desa Betoyokauman

a. Geografis Desa Betoyokauman

Desa Betoyokauman memiliki letak geografis yang cukup strategis karena dikelilingi oleh Tambak. Peneliti akan memaparkan lokasi Desa Betoyokauman dengan rinci sebagai berikut.

Batas Wilayah Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yaitu :

[54] Arsip Desa Betoyokauman. Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Barat : Desa Sumberejo dan Desa Tanggul Kecamatan Manyar, Kabupaten Lamongan
- Sebelah Timur : Desa Betoyoguci dan Desa Bayuwangi Kecamatan Manyar
- Sebelah Utara : Desa Sembayat dan Desa Gumeno Kecamatan Manyar
- Sebelah Selatan : Desa Leran Kecamatan Manyar dan Kecamatan Duduk Sampeyan.

b. Data Demografi Desa Betoyokauman

1) Jumlah penduduk Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Terdapat 726 Kepala Keluarga di Desa Betoyokauman. Dengan rincian jumlah penduduk, berjenis kelamin laki-laki 1.300 orang dan berjenis kelamin perempuan 1.229 orang, dengan total 2.529 warga. Berikut jumlah penduduk Desa Betoyokauman berdasarkan sebaran di beberapa Rukun Warga.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

No.	Rukun Warga	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	**Total**	
1.	Kali Sawo RW 01	322	267	589	157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Kali Anyar RW 02	300	277	577	167
3.	Brang Kidul RW 03	307	319	626	193
4.	Dukuan Sari RW 04	371	366	737	209
	Jumlah	1.300	1.229	2.529	726

*(**Sumber :** Data Arsip Jumlah Penduduk Desa Betoyokauman, 2019)*

2) Kemiskinan masyarakat Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Jumlah kemiskinan masyarakat Desa Betoyokauman berjumlah 86 Jiwa dari 2.529 penduduk. Kemiskinan di RW 01 berjumlah 55 jiwa dari 589 penduduk, dan jumlah kemiskinan di RW 02 berjumlah 5 jiwa dari 577 penduduk, jumlah kemiskinan di RW 03 berjumlah 6 jiwa dari 626 penduduk, serta jumlah kemiskinan RW 04 berjumlah 20 jiwa dari 737 penduduk. Berikut adalah tabel kemiskinan Masyarakat Desa Betoyokauman.

Tabel 1.3

Kemiskinan Masyarakat Desa Betoyokauman

No	**Uraian Aspek**	**Jumlah Kemiskinan**	**Jumlah Penduduk**
	Tingkat Kemiskinan Penduduk		
1.	RW 01	55 jiwa	589 penduduk
2.	RW 02	5 jiwa	577 penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	RW 03	6 jiwa	626 penduduk
4.	RW 04	20 jiwa	737 penduduk
Total		86 jiwa	2.529 penduduk

*(**Sumber :** Data Arsip Jumlah Kemiskinan Desa Betoyokauman, 2019)*

Dengan angka kemiskinan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Desa Betoyokauman masih sangat kecil di bandingkan dengan Desa lain. Hal tersebut dapat dilihat dari total kemiskinan di Desa Betoyokauman sebanyak 86 jiwa. Dengan rincian jumlah kemiskinan terbanyak berada di RW 01 dengan jumlah kemiskinan 55 jiwa dari 589 penduduk, sedangkan jumlah kemiskinan paling sedikit berada di RW 02 dengan jumlah kemiskinan 6 jiwa dari 626 penduduk.

3) Mata Pencaharian Masyarakat Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Mata Pencaharian masyarakat Desa Betoyokauman yang paling besar sebagai seorang Pegawai Swasta sejumlah 400 orang, petani tambak sejumlah 201 orang, sebagai buruh pabrik sejumlah 200 orang. Dari jumlah tersebut bisa dilihat bahwa keadaan ekonomi masyarakat Desa Betoyokauman sedikit banyak akan membantu perangkat Desa Betoyokauman untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan Program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Harapan. Berikut adalah tabel keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Betoyokauman :

Tabel 1.4

Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	201 Orang
2.	Buruh tani	200 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	8 Orang
4.	Pegawai Swasta	400 Orang
5.	TNI	1 Orang
6.	Tukang Kayu	10 Orang
7.	Tukang Jahit	10 Orang
8.	Tukang Ojek	20 Orang
9.	Reparasi Sepeda Motor	1 Orang
10.	Pedagang	66 Orang

*(**Sumber :** Arsip data sosial dan ekonomi Desa Betoyokauman, 2019)*

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Penyajian Data

a. Sejarah Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman

Program Keluarga Harapan merupakan program yang sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2007, Desa Betoyokauman adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang telah menjalankan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2008. Program tersebut diterapkan kepada masyarakat desa Betoyokauman yang telah memenuhi komponen dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018.

Gambar 1.1

Kartu Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman

*(**Sumber** : Dokumentasi Kartu Penerima Program Keluarga Harapan Desa Betoyokauman, 2020)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Keluarga Harapan merupakan program yang sesuai dengan amanah dan Undang-Undang, bahwa negara mempunyai kewajiban terhadap hak-hak fakir miskin dan orang-orang terlantar yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah meninjau dan memahami bagaimana konsep Program Keluarga Harapan, Dinas Sosial Kabupaten Gresik merealisasikan Program Keluarga Harapan masuk di Kecamatan Manyar sejak tahun 2008, dan Program tersebut tertulis di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018.

Program Keluarga Harapan ini berbeda dengan program bantuan sosial yang lainnya. Untuk bantuan sosial yang lainnya hanya berbentuk instan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan bantuan-bantuan yang lainnya. Tetapi untuk Program Keluarga Harapan ini adalah khusus diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki kriteria dan komponen penerima Program Keluarga Harapan di antaranya yaitu :

1. Pasal 5 ayat 1 berbunyi:

   Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

   a. Ibu hamil/menyusui, dan

   b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Pasal 5 ayat 2 berbunyi:

   Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat

f. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat

g. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan

h. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Pasal 5 ayat 3 berbunyi:

Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Lanjut Usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan

b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Besaran bantuan di program PKH disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.

Tabel 1.5

Indeks Dana Bantuan Sosial PKH Tahun 2020

No	Bantuan Kategori Setiap Jiwa		
1.	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000	**Maksimal 4 Orang Dalam Satu Keluarga**
2.	Anak Usia Dini	Rp. 3.000.000	
3.	SD	Rp. 900.000	
4.	SMP	Rp. 1.500.000	
5.	SMA	Rp. 2.000.000	
6.	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000	

*(**Sumber :** Diolah oleh peneliti dari data Kementrian Sosial RI, 2020)*

No	Keterangan
1.	Umur Lansia 70 tahun
2.	Lansia di dalam Keluarga Maksimal 1 Jiwa Dalam KPM
3.	Ibu Hamil Maksimal kehamilan ke-2

*(**Sumber :** Diolah oleh peneliti dari data Kementrian Sosial RI, 2020)*

Kemudian untuk kebijakan dari Program Keluarga Harapan juga tergantung dari kebijakan Kementrian Sosial pusat, pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan dan pendamping Program Keluarga Harapan Desa hanya menyampaikan kebijakan sesuai data terbaru yang sudah ditetapkan Kementrian Sosial pusat yang sewaktu-waktu bisa berubah.

b. Sususunan Struktur Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman

Program Keluarga Harapan sebagai salah satu program unggulan Kementrian Sosial (Kemensos) program Nasional yang telah terbukti berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan adalah pelaksana Program Keluarga Harapan di bawah koordinasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Sosial yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan, aplikator pangkalan data (APD) tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi, koordinator Kota/Kabupaten, koordinator Wilayah, dan koordinator Regional.

Sumber Daya Manusia memiliki peran besar dalam mendorong pemberdayaan menjadi gerakan sosial untuk mempercepat penerima manfaat berdaya dan mandiri secara sosial ekonomi. Oleh karena itu Tim Pelaksan Program Keluarga Harapan membentuk susunan pengurus mulai dari tingkatan Kementrian Sosial, Dirjen hingga tingkatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berikut tabel 1.6 dan tabel 1.7 tentang struktur tim pelaksana Program Keluarga Harapan :

Tabel 1.6

Struktur Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Tingkat Pusat hingga Kabupaten

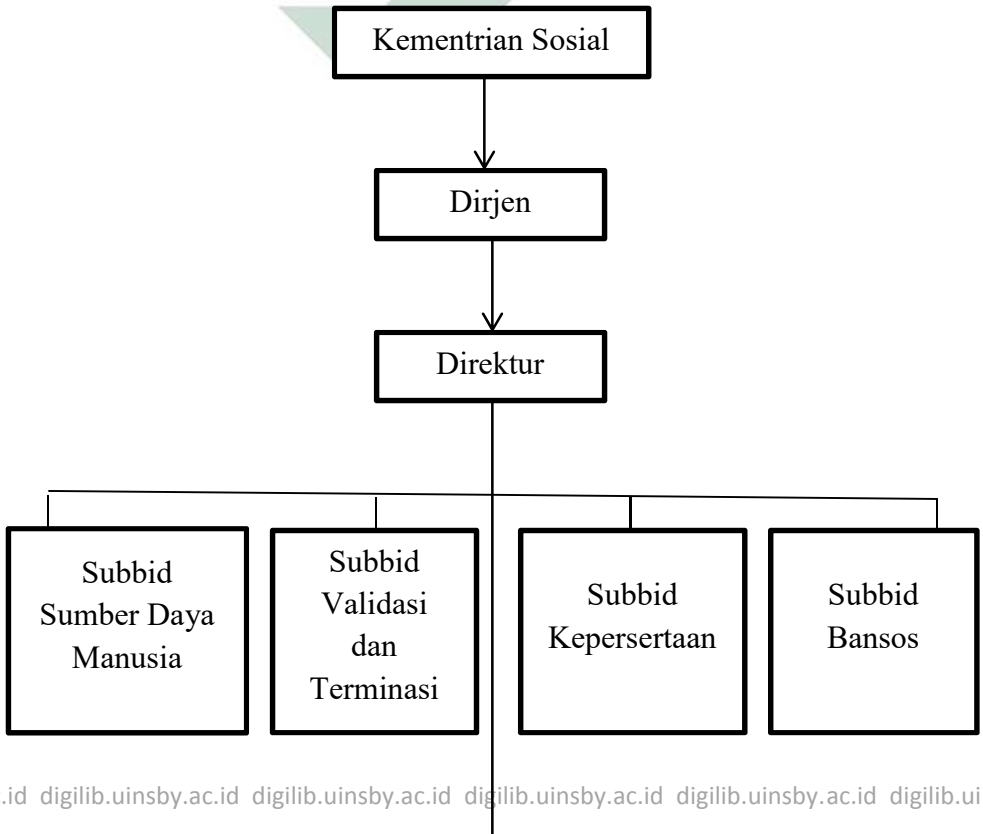

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

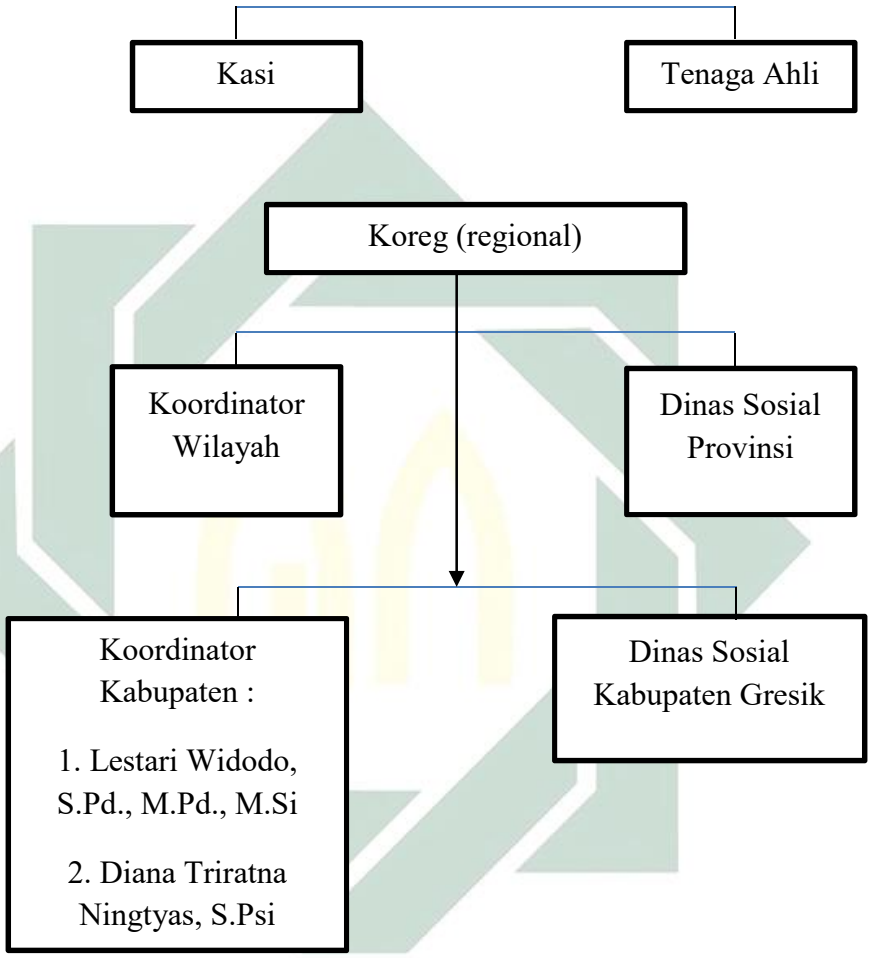

*(**Sumber :** Arsip Struktur Pelaksana Program Keluarga Harapan, 2019)*

Tabel 1.7

Struktur Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Tingkat Kabupaten hingga Desa Betoyokauman

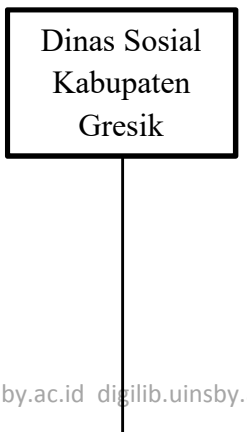

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

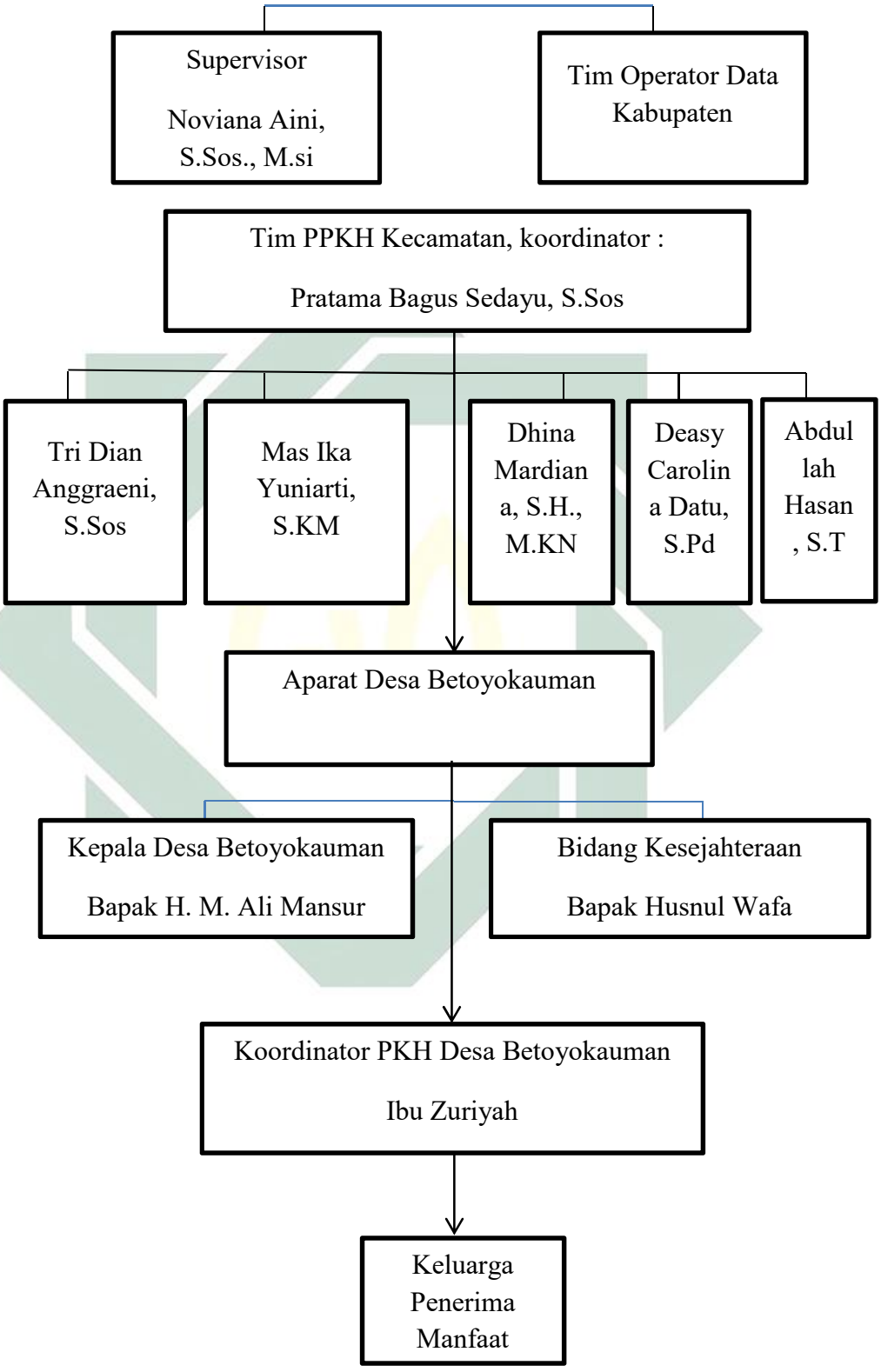

*(**Sumber :** Arsip Struktur Pelaksana Program Keluarga Harapan, 2019)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tahapan Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman

Dalam hal ini masyarakat Desa Betoyokauman secara umum rata-rata menerima dan melaksanakan dengan baik tahapan Program Keluarga Harapan, dilihat dari prilaku masyarakat dalam menjalankan empat tahapan yang telah dibuat oleh tim pendamping pelaksana Program Keluarga Harapan, sebagaimana diantaranya adalah :

a. Tahapan Sosialisasi Program Keluarga Harapan
b. Tahapan Verifikasi Pendidikan
c. Tahapan Verifikasi Kesehatan
d. Tahapan Kesejahteraan Sosial dan Disabilitas.

Adapun hasil dari penggalian data dengan informan yang bersangkutan mengenai Pandangan masyarakat Desa Betoyokauman terhadap Program Keluarga Harapan. Maka, peneliti akan memaparkan setiap Program Keluarga Harapan yang dijalankan di Desa Betoyokauman sebagai berikut :

1. Tahapan Sosialisasi Program Keluarga Harapan

Sosialisasi Program Keluarga Harapan adalah tahapan sosialisasi yang di buat oleh Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan untuk memberikan wawasan bagaimana cara mengelola dana dari Program Keluarga Harapan serta pengetahuan yang luas mengenai manfaat dan tujuan dari adanya program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Harapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2

Program Sosialisasi PKH Desa Betoyokauman

*(**Sumber** : Arsip Dokumentasi Program Keluarga Harapan Desa Betoyokauman, 2019)*

Program Sosialisasi tersebut dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh Masyarakat Desa Betoyokauman yang telah mendapatkan Program Keluarga Harapan, seluruh masyarakat desa Betoyokauman yang memperoleh Program Keluarga Harapan dianjurkan untuk mengikuti soialisasi tersebut guna memperoleh wawasan lebih mendalam tentang Program Keluarga Harapan. Apabila salah seorang anggota Program Keluarga Harapan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut maka akan diberikan sanksi oleh pendamping Program Keluarga Harapan desa dengan denda Rp. 10.000 setiap pertemuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Sosialisasi yang dibuat oleh Tim pendamping Program Keluarga Harapan ini sudah terlaksana, namun pandangan dari masyarakat Desa Betoyokauman masih belum terealisasikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi Program Keluarga Harapan. Kendala pada saat mengumpulkan peserta Program Keluarga Harapan membuat sosialisasi Program Keluarga Harapan ini tidak berjalan secara baik, tidak semuanya hadir mengikuti sosialisasi yang sudah ditetapkan oleh tim pendamping Program Keluarga Harapan serta banyaknya alasan dari peserta untuk tidak mengikuti sosialisasi. Meskipun demikian, dari tim pendamping Program Keluarga Harapan desa tetap memberikan sanksi jika peserta Program Keluarga Harapan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut, yang nantinya akan di denda dengan nominal Rp 10.000 disetiap pertemuan. Namun jika ada izin dengan alasan yang logis maka pendamping Program Harapa desa membolehkan untuk tidak mengikuti sosialisasi Program Keluarga Harapan.

> "Saya sendiri jarang mbak untuk mengikuti sosialisasi Program Keluarga Harapan, kalau kendala dari saya ya saya jarang hadir di sosialisasi tersebut karena barengan sama jam bekerja saya mbak, saya gak bisa harus ninggalin pekerjaan saya di pabrik demi mengikuti sosialisasi ini, mending saya harus membayar denda Rp.10.000 saja mbak dari pada saya harus kehilangan penghasilan saya satu hari di pabrik".[55]

[55] Hasil wawancara dengan Ibu Sulaturrohmi (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 30 Januari 2020 Pukul 11.17 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal pandangan Tim pendamping Program Keluarga Harapan Desa Betoyokauman khususnya pada tahapan sosialisasi Program Keluarga Harapan ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan serta wawasan kepada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta keterampilan sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Bukan hanya itu saja, sosialisasi diadakan juga bertujuan untuk melakukan koordinasi yang lebih dalam tentang keluh kesah serta masukan-masukan oleh peserta Program Keluarga Harapan kepada tim pendamping Program Keluarga Harapan.

2. Tahapan Verifikasi Pendidikan

Program Verifikasi adalah proses pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data. Program Verifikasi Pendidikan ini merupakan kunjungan ke sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP hingga SMA yang terdapat anak-anak sekolah dari keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Untuk keperluan mengetahui tingkat komitmen peserta Program Keluarga Harapan, maka anak-anak sekolah dari keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan wajib menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran minimal 85% hari efektif sekolah dan tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. Tingkat kehadiran peserta didik harus diverifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh para tenaga pendidik di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.

Prosedur verifikasi adalah sebagai berikut :

1. Lembaga pendidikan akan menerima formulir verifikasi dari pendamping.
2. Sesuai aturan yang berlaku di sekolah, tenaga pendidik melakukan absensi kehadiran peserta didik di tiap-tiap kelas atau kelompok belajar.
3. Untuk keperluan mengetahui tingkat komitmen peserta Program Keluarga Harapan, maka tenaga pendidik harus merekap absensi kehadiran peserta didik di kelas atau kelompok belajar selama satu bulan berjalan. Selanjutnya tenaga pendidik mencatat nama peserta didik peserta Program Keluarga Harapan yang tidak hadir atau tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan, yaitu setidaknya 85% dari jumlah hari efektif sekolah atau ketentuan.
4. Formulir verifikasi dari pendamping yang telah diisi atau diperiksa oleh tenaga pendidik (sekolah SD/MI, MTS, serta MA) dan diketahui oleh kepala sekolah, setiap 3 bulan akan diambil oleh petugas pendamping untuk diproses lebih lanjut.
5. Pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksana Program Keluarga Harapan di setiap lembaga pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menjamin agar peran tersebut dapat dijalankan dengan optimal.

Program Validasi Pendidikan yang dibuat oleh Tim Pendamping Pelaksana Program Keluarga Harapan ini sudah terlaksana, adapun pandangan dari masyarakat Desa Betoyokauman terhadap validasi pendidikan ini menyatakan program ini sangat baik. Mereka akhirnya mengetahui tentang bagaimana pentingnya keaktifan anak-anaknya selama di sekolah serta mengetahui dampak apabila anak-anaknya tidak aktif dan sering bolos ketika proses belajar mengajar berlangsung.

> "Alhamdulillah mbak, dengan adanya program validasi pendidikan ini anak saya semakin aktif di sekolah, nilai rapotnya juga semakin baik dari sebelumnya. Bukan hanya itu saja dulu anak saya kalau mau berangkat sekolah itu ada saja alasannya, tapi sekarang-sekarang ini semakin rajin sekali kalau mau berangkat sekolah jam 5 gitu sudah mau bangun mbak."[56]

Pandangan dari Tim Pendamping Program Keluarga Harapan dirasa bahwa program ini sangat baik. Dengan tujuannya untuk mengetahui tingkat keaktifan anak sekolah peserta Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman, disamping itu juga tim pendamping Program Keluarga Harapan juga mengecek absensi dari masing-masing anak sekolah peserta Program Keluarga Harapan. Dikarenakan jika bukan dari tim pelaksana Program Keluarga Harapan melakukan pendampingan, maka penyadaran

[56] Hasil wawancara dengan Ibu Ninik Zulaikha (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 30 Januari 2020 Pukul 19.33 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan pentingnya kektifan belajar di sekolah itu dirasa kurang dalam kesadaran pelajar di lembaga Pendidikan Desa Betoyokauman.

3. Tahapan Verifikasi Kesehatan

Program Verifikasi Kesehatan ini merupakan program dari adanya Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan, yang mana dalam program ini pendamping mensyaratkan peserta Program Keluarga Harapan melakukan kunjungan rutin ke berbagai sarana kesehatan. Oleh karena itu, program ini secara langsung akan mendukung pencapaian target program kesehatan.

Setiap anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan. Berbagai fasilitas dimaksud adalah :

a. Puskesmas

   Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan yang menjadi persyaratan bagi peserta Program Keluarga Harapan Kesehatan.

b. Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

   Puskesmas pembantu dan puskesmas keliling, yang merupakan satelit puskesmas (dan jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.

c. Polindes dan Poskesdes

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pondok bersalin desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bagi bayi baru lahir, maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat.

d. Posyandu

Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dari puskesmas, serta bidan Desa Betoyokauman diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan baik, penimbangan bayi, serta penyuluhan kesehatan.

e. Bidan Praktek

Di samping memberikan pelayanan kesehatan di polindes, bidan Desa Betoyokauman yang melakukan praktek dirumah dapat dimanfaatkan oleh peserta Program Keluarga Harapan khususnya dalam pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus kegawat daruratan.

Dapat dilihat Gambar 1.3 tentang Program Verifikasi Kesehatan di Desa Betoyokauman di bawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.3

Program Verifikasi Kesehatan

*(**Sumber :** Arsip Dokumentasi dalam Program Verifikasi Kesehatan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman)*

Program Validasi Kesehatan yang dibuat oleh Tim pendamping Program Keluarga Harapan ini sudah terlaksana dengan baik, program validasi kesehatan ini memberikan dampak yang baik terhadap kesehatan masyarakat Desa Betoyokauman terutama peserta Program Keluarga Harapan.

Pandangan dari masyarakat Desa Betoyokauman juga memberikan pernyataan bahwa Program Validasi Kesehatan ini sudah berjalan dengan baik. Karena dalam validasi kesehatan ini terdapat Hak dan Kewajiban pemberi layanan kesehatan terhadap peserta Program Keluarga Harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Enak mbak sekarang ini kesehatan masyarakat Desa Betoyokauman bisa terkontrol dengan baik, apalagi sekarang dari petugas puskesmas atau petugas kesehatan sudah mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada peserta Program Keluarga Harapan"[57]

Adapun Hak dan Kewajiban pemberi layanan kesehatan terhadap peserta Program Keluarga Harapan, diantaranya :

a. Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) terhadap Peserta Program Keluarga Harapan

   Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) atau Jamkesmas di Puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang akan diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan apa yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin atau Jamkesmas.

b. Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan terhadap Peserta Program Keluarga Harapan

   1. Menetapkan jadwal kunjungan

      Pada tahap awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta Program

[57] Hasil wawancara dengan Ibu Muya (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 18 Januari 2020 Pukul 16.45 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Harapan ke berbagai fasilitas kesehatan. Prosedur penetapan jadwal kunjungan peserta Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut :

a) Puskesmas akan menerima formulir jadwal kunjungan peserta Program Keluarga Harapan kesehatan dari pendamping Kecamatan. Dalam formulir jadwal kunjungan tersebut sudah tertulis nama anggota keluarga, jenis pelayanan atau pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan, status pelayanan atau pemeriksaan kesehatan, tanggal dan nama atau tempat pelayanan kesehatan.
b) Untuk mengisi status pemberian pelayanan kesehatan :
   - Jika calon peserta Program Keluarga Harapan sudah pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau jaringan kerja puskesmas tersebut, maka petugas puskesmas harus mencocokkan dengan register yang tersedia di puskesmas (yaitu daftar ibu hamil, buku imunisasi, serta penimbangan, dan lain-lain).

     Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku register, petugas puskesmas akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan yang sudah diberikan kepada setiap anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan.

- Jika calon peserta Program Keluarga Harapan belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau jaringan kerja puskesmas (ini berarti register calon peserta tersebut tidak tersedia di puskesmas), maka petugas puskesmas harus menanyakan langsung kepada calon peserta Program Keluarga Harapan pada waktu acara pertemuan awal.

c) Setelah klarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dilakukan, petugas puskesmas menetapkan tanggal dan nama sarana kesehatan yang harus dikunjungi oleh seluruh anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan yang disyaratkan.

d) Formulir kunjungan yang sudah terisi akan diambil langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan di Puskesmas (paling telat 1 minggu sebelum acara pertemuan awal).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghadiri pertemuan awal

Perwakilan puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara pertemuan awal dengan seluruh calon peserta Program Keluarga Harapan. Dalam pertemuan ini, petugas puskesmas berkewajiban untuk :

a) Mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dengan calon peserta Program Keluarga Harapan, khususnya bagi mereka yang datanya tidak tercatat dalam register.

b) Menjelaskan tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan serta tempat pemberi pelayanan kesehatan terdekat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta Program Keluarga Harapan.

3. Memberi pelayanan kesehatan

Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan baik secara aktif maupun pasif kepada semua peserta Program Keluarga Harapan. Secara aktif, misalnya mengunjungi peserta Program Keluarga Harapan yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk diberikan pelayanan dan pembinaan. Secara pasif dengan cara memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam memberikan pelayanan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petugas kesehatan harus mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku. Penetapan persyaratan Program Keluarga Harapan kesehatan akan berimplikasi pada peningkatan jumlah kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh karenanya, pemberi pelayanan kesehatan harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan (seperti, Vitamin A, Vaksin, tenaga kesehatan, dan lain-lain.

4. Memverifikasi komitmen peseta Program Keluarga Harapan

   Pembayaran bantuan komponen kesehatan pada tahap berikutnya diberikan atas dasar verifikasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Jika peserta Program Keluarga Harapan memenuhi komitmennya (yaitu mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah ditetapkan sesuai jadwal kunjungan di atas), maka peserta Program Keluarga Harapan akan menerima bantuan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Prosedur verifikasi komitmen peserta adalah sebagai berikut :

   - Pemberi Pelayanan Kesehatan akan menerima formulir verifikasi komitmen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta Program Keluarga Harapan dari pendamping.

- Petugas puskesmas mengirim formulir verifikasi tersebut ke setiap Pemberi Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah otoritas puskesmas, seperti puskesmas pembantu, polindes, posyandu. Pengiriman formulir ke setiap Pemberi Pelayanan Kesehatan ini perlu dicocokkan dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.
- Proses verifikasi yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan adalah memeriksa formulir kesehatan tersebut dan mengisi absen pada nama anak atau ibu hamil yang tidak hadir sesuai jadwal kunjungan yang telah ditentukan.
- Formulir yang telah diperiksa atau diverifikasi oleh petugas kesehatan tersebut selanjutnya diambil langsung oleh petugas puskesmas. Kemudian petugas puskesmas akan merekap atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatat anak serta ibu hamil yang tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan.

- Pendamping akan mengambil hasil catatan ketidakhadiran ini setiap 3 bulan sekali.

  Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan (yaitu semua kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam Program Keluarga Harapan).

4. Tahapan Kesejahteraan Sosial

Program Kesejahteraan Sosial ini di buat oleh Tim Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Betoyokauman. Dapat dilihat Gambar 1.4 tentang Program Kesejahteraan Sosial di bawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.4

Program Kesejahteraan Sosial

*(**Sumber :** Arsip Dokumentasi Program Kesejahteraan Sosial, 2019)*

Program Kesejahteraan Sosial ini yakni suatu bidang usaha manusia, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam badan atau usaha sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial pada kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, dan peyesuaian sosial.

Progam ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Betoyokauman yang mendapatkan Program Keluarga Harapan. Menurut Tim pendamping Program Keluarga Harapan Desa Betoyokauman, program tersebut diterapkan untuk melakukan monitoring kepada peserta Program Keluarga Harapan terutama yang menyandang disabilitas dan lanjut usia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Kesejahteraan Sosial ini sudah terlaksana dan mendapat pandangan yang baik dari masyarakat Desa Betoyokauman terutama yang mendapatkan implementasi Program Keluarga Harapan. Mereka bersyukur karena masih ada orang lain yang peduli terhadap kesejahteraan sosial di Desa Betoyokauman ini terutama dalam Program Keluarga Harapan.

Masyarakat Desa Betoyokauman pada umumnya memberikan tanggapan yang positif dari kegiatan tersebut karena dari kegiatan tersebut kesejahteraan sosial di Desa Betoyokauman ini semakin lebih baik dengan adanya controling dari pendamping Program Keluarga Harapan yang rutin mengecek setiap bulannya untuk memastikan perkembangan dari kesejahteraan sosial terutama untuk penyandang Disabilitas dan juga peserta Program Keluarga Harapan yang sudah Lanjut Usia.

d. Hasil dan Perubahan Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Adanya Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman

Salah satu program bantuan sosial yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan yakni Program Keluarga Harapan. Berikut hasil dan perubahan kondisi sosial masyarakat sejak adanya implementasi Program Keluarga Harapan diantaranya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Program Keluarga Harapan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di Desa Betoyokauman pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Dengan bantuan Program Keluarga Harapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak. Sehingga kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan. Yang terpenting, anak dapat tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk.

Kedua, Program Keluarga Harapan melalui pendamping, harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan Program Keluarga Harapan untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga kedepannya tarap hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meningkat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri.

Ketiga, Program Keluarga Harapan sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan di Desa Betoyokauman karena memiliki indeks dan bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat semakin sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti akan memaparkan beberapa hasil temuan dari proses observasi dan wawancara untuk menjawab dari rumusan masalah. Deskripsi data merupakan penjelasan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Secara umum ada data sekunder dan data primer. Data primer dalam penelitian ini mengenai implementasi, faktor dan penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Data yang yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan tindakan yang didapatkan dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan informan menjadi sumber utama dalam penelitian dicatat menggunakan catatan tertulis dan menggunakan alat perekam suara yang digunakan dalam penelitian.

Selain data primer peneliti juga menemukan data sekunder, adapun data sekunder yang peneliti dapatkan meliputi : Dokumentasi foto berupa kegiatan, Lampiran data Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, media pendukung Program Keluarga Harapan berupa foto. Data-data tersebut sebagai data pendukung yang digunakan peneliti. Berikut merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, faktor dan penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Desa Betoyokauman ini menjalankan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2008 hingga saat ini, Program tersebut berawal sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 yang di turunkan ke Desa Betoyokauman untuk di implementasikan kepada masyarakat Desa Betoyokauman.

Untuk kecukupan referensi, peneliti mencatat apa yang diutarakan oleh informan dan merekamnya dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu : interpretasi penelitian, yaitu melakukan kajian penemuan dilapangan dengan dasar oprasional yang telah ditentukan sejak awal, kemudian melihatnya secara teoritis.

Setelah itu peneliti menggunakan teori implementasi dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yaitu :

a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan

b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana

c. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan

d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak

e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan intansi pelaksana

f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.[58]

[58] Deddy Mulyadi, "*Studi kebijakan publik dan pelayanan publik"*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keenam proses tersebut peneliti akan memaparkan secara rinci hasil penelitian berupa implementasi, faktor-faktor dan penilaiam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai berikut:

a. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman

1. Tahap Pengesahan Proses Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan dalam Peraturan Perundangan

Program Keluarga Harapan merupakan program Kementrian Sosial, karena Program Keluarga Harapan adalah program prioritas Nasional yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dalam pelaksanaannya juga bertujuan untuk mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sudah graduasi sejahtera mandiri atau lulus dari kepesertaan Program Keluarga Harapan. Yang sesuai dengan Peratuaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam tahapan penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, terdapat 10 proses dalam tahapan ini, diantaranya :

1) Perencanaan

2) Penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Validasi data calon peserta Program Keluarga Harapan
4) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
5) Penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan
6) Pendampingan Program Keluarga Harapan
7) Peningkatan kemampuan keluarga
8) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat
9) Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat, dan
10) Transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan.

Berikut runtutan proses dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.5

Proses Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

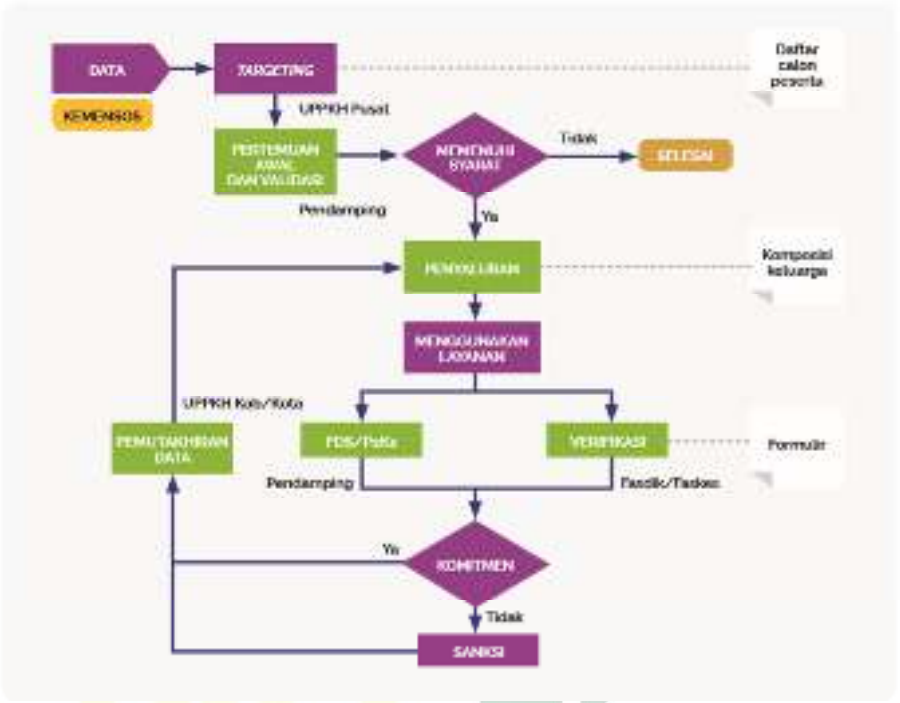

*(**Sumber :** Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2019)*

Tahapan 1: Perencanaan

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (Dit-JSK) menentukan lokasi dan jumlah calon peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan data yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Sumber data calon peserta Program Keluarga Harapan dapat dikecualikan bagi:

1) Korban bencana alam
2) Korban konflik sosial, dan
3) Anggota komunitas adat terpencil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan 2: Penetapan Calon Peserta Program Keluarga Harapan

Direktur Jaminan Sosial Keluarga (Dir-JSK) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon peserta Program Keluarga Harapan menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan Program Keluarga Harapan.

Tahapan 3: Persiapan Daerah

Dinas Sosial membentuk pelaksana Program Keluarga Harapab tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), serta menyediakan prasarana pendukung pelaksanaan program.

Tahapan 4: Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial Program Kelarga Harapan menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan Program Keluaga Harapan, melakukan validasi data calon peserta Program Keluarga Harapan, dan mendapatkan komitmen calon peserta Program Keluarga Harapan melalui penandatanganan formulir validasi. Calon peserta Program Keluarga Harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal dapat divalidasi dengan cara pendamping sosial Program Keluarga Harapan mengunjungi rumah calon peserta Program Keluarga Harapan.

Validasi data calon peserta Program Keluarga Harapan adalah pencocokan data awal keluarga calon peseta Program Keluarga Harapan dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen.

Pengurus keluarga untuk pembukaan rekening bank. Pendamping sosial Program Keluarga Harapan melakukan validasi data dengan menggunakan formulir validasi.

Keluarga yang tidak termasuk data calon peserta Program Keluarga Harapan tidak dapat mengikuti proses validasi. Namun, data keluarga tersebut dapat diusungkan pemangku kepentingan tingkat Kabupaten/Kota kepada Kemensos menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos).

Tahapan 5: Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Direktur Jaminan Sosial Keluarga (Dir-JSK) mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan Keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berdasarkan hasil:

1) Validasi data calon peserta Program Keluarga Harapan
2) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan lama dan
3) Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan lama.

Tahapan 6: Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Secara Non Tunai

Besaran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan tetap hanya diberikan pada tahap pertama setiap tahun. Sementara itu, bantuan komponen diberikan kepada maksimal empat anggota keluarga yang memenuhi komponen program dan nilai bantuan disebar pada tiga tahap berikutnya setiap tahu.

Dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan disalurkan secara non tunai ke rekening Pengurus Program Keluarga Harapan yang diakses dengan kartu debit "Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)". Selama satuh anggaran, dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan disalurkan dalam empat tahap, yaitu:

Tahap (1) : Januari

Tahap (2) : April

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap (3) : Juli

Tahap (4) : Oktober

Untuk setiap tahap penyaluran, Direktur Jaminan Sosial Keluarga (Dir-JSK) mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Penetapan tersebut berdasarkan hasil verifikasi atau pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat selama periode tiga bulan oleh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan.

Tahapan 7: Pendampingan Program Keluarga Harapan

Pendampingan sosial Program Keluarga Harapan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan menerima hak dan memenuhi kondisionalitas program, yaitu:

1) Menerima dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang tepat jumlah dan tepat sasarannya
2) Mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga secara berkelompok paling sedikit sekali sebulan, dan
3) Mendapatkan manfaat program bantuan komplementer.

Khusus untuk anggota keluarga lansia mulai 60 tahun dan penyandang disabilitas berat. Pendampingan dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pendamping sosial khusus untuk urusan rehabilitasi sosial lansia dan penyandang disabilitas.

Melalui pertemuan kelompok Program Keluarga Harapan bulanan, pendamping sosial Program Keluarga Harapan juga menjalankan fungsi yaitu :

1) Penanganan pengaduan masyarakat (yang terhubung dengan *Contact Center* Program Keluarga Harapan)
2) Edukasi pengelolaan bantuan non tunai dan literasi keuangan inklusi.

Tahapan 8: Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Peningkatan kemampuan keluarga yang diselenggarakan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan (minimal sekali sebulan) merupakan proses belajar terstruktur untuk mempercepat perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada saat ini, tersedia lima modul peningkatan kesejahteraan keluarga, yaitu : kesehatan dan gizi, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.

Tahapan 9: Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan untuk memastikan anggota keluarga terdaftar dan hadir memenuhi persyaratan program pada faskes, fasdik, dan faskesos. Pendamping sosial Program Keluarga Harapan melakukan verifikasi komitmen menggunakan aplikasi mobile untuk mencatat tingkat kehadiran anggota Keluarga Penerima Manfaat pada setiap fasdik, faskes, atau faskesos sesuai dengan protokol masing-masing komponen.

Tahapan 10: Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga. Pendamping sosial Program Keluarga Harapan menggunakan aplikasi mobile untuk mencatat kondisi terkini pada setiap kunjungan ke keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Tahapan 11: Transformasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan

Transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan merupakan proses pengakhiran masa kepesertaan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi. Kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan evaluasi untuk menetapkan status kepesertaan dan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Meskipun demikian, keputusan proses penyelenggaraan Program Keluarga Harapan sudah di tetapkan sesuai dengan Permensos No.1 Tahun 2018. Ada beberapa yang kontra terhadap Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tersebut.

> "Jika dalam penetapan peserta Program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran mbak, maka kita harus ada sinkronisasi dengan lintas sektor yakni dengan stakeholder, dengan perangkat desa, dengan camat. Jadi dari dinas sosial pun harus punya tindakan bagaimana caranya ketika bantuan yang tidak tepat sasaran, berarti dari dinas sosial harus punya tim koordinasi untuk mengumpulkan dan memperbaiki data. Terus misal jika ada pelanggaran dari tim SDM misalkan kinerjanya kurang baik, nah itu dari dinas sosial berhak untuk menegur, karena dinas sosial adalah kepanjangan dari kementrian sosial, tidak mungkin kalau kementrian sosial harus mantengin tiap kabupaten, nah fungsi dari dinas sosial seperti itu, menegur siapa SDM yang tidak benar kinerjanya, terus mengingatkan perangkat jika memang ada masyarakat yang tidak tepat sasaran kita bicarakan, agar nanti didaftarkan kembali yang belum mendapatkan bantuan melalui data (basis data terpadu) BDT seperti itu."[59]

Pernyataan serupa dari bapak H.M. Ali Mansur :

[59] Hasil wawancara dengan Ibu Diana Triratna Ningtyas, S.Psi (Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Gresik) Pada tanggal 13 Januari 2020 Pukul 09.25 di Kantor Dinas Sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Program Keluarga Harapan ini belum tersalurkan secara merata kepada masyarakat miskin Desa Betoyokauman karena kita hanya bisa mengusulkan, dan keputusan ada dipusat, meskipun kadang-kadang ada yang protes sebenarnya ini dapat dan sebenarnya ini tidak dapat saya benar-benar tidak bisa memberikan keputusan mbak, maunya saya ya sebenarnya semua masyarakat miskin di Desa Betoyokauman mendapatkan Program Keluarga Harapan mbak tapi saya tidak mempunyai wewanang untuk memutuskan hal itu, tetap dari pusat yang berhak menetapkan. Kemudian untuk menerapkan Program Keluarga Harapan ini dengan baik maka kita melakukan tahapan penentuan peserta Program Keluarga Harapan memalui musyawarah desa yang dihadiri oleh toko masyarakat, perangkat dan semua BPD serta RT RW untuk mencari data warga yang tidak mampu dengan menyerahkan Kartu Keluarga dan lain sebagainya, kemudian kita usulkan ke pusat dan yang menentukan adalah pusat."[60]

Dilihat dari hasil wawancara dengan berbagai macam pihak, cara pengambilan Kebijakan Program Keluarga Harapan ini sudah baik. Karena tindakan dari Tim Program Keluarga Harapan terutama dari dinas sosial, dengan camat dan dari perangkat desa dalam memutuskan dan merumuskan ketika terjadi kendala dalam pelaksanaan dan proses penyelenggaraan Program Keluarga Harapan.

Adapun respon serta tanggapan dari Kepala Desa Betoyokauman ketika terjadi kendala dalam pelaksanaan dan proses penyelenggaraan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman yakni melalui musyawarah desa yang dihadiri

[60] Hasil wawancara dengan bapak H.M. Ali Mansur (Kepala Desa Betoyokauman) Pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 08.19 di Kantor Kepala Desa Betoyokauman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh toko masyarakat, perangkat, BPD serta RT RW untuk memverifikasi ulang data masyarakat Desa Betoyokauman yang tidak mampu dengan menyerahkan Kartu Keluarga dan lain sebagainya.

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana

Pada tahapan ini, yakni proses pelaksanaan keputusan. Kementrian Sosial Republik membentuk Tim Pelaksana dari Program Keluarga Harapan untuk menjalankan program tersebut. Tim pelaksana Program Keluarga Harapan memiliki beberapa tim diantaranya Dirjen, Direktur, 4 Subbid (subbid SDM, subbid validasi dan terminasi, subbid kepesertaan dan subbid bansos), kasi dan tenaga ahli, koreg, koordinatot wilayah dan dinas sosial provinsi, koordinator kabupaten dan dinas sosial kabupaten serta yang terakhir ada tim pendamping. Beberapa tim tersebut bertugas menjalankan dan mengawasi Program Keluarga Harapan. Dalam menjalankan program Keluarga Harapan, Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan menjalankan program tersebut berlandaskan aturan yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kegiatan setiap rutinnya adalah Sosialisasi Program Keluarga Harapan, kegiatan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikuti oleh peserta Program Keluarga Harapan yang sudah ditentukan, program sosialisasi tersebut biasanya menyesuaikan waktu, seperti yang rutin di lakukan setiap 3 bulan sekali untuk melaksanakan program "Verifikasi Pendidikan" di lembaga pendidikan secara serentak. Dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP hingga SMA yang terdapat anak-anak sekolah dari keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan, ada juga kegiatan Verifikasi Kesehatan yang di ikuti oleh seluruh peserta penerima Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan memilih langkah awal menjalankan Program Keluarga Harapan dengan cara mengirimkan surat pernyataan sebagai peserta Program Keluaga Harapan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali.

Langkah kedua mengenai sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan,

> "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan mengawasi dan mengontrol peserta Program Keluarga Harapan secara langsung. Terutama dalam program verifikasi pendidikan dan program verifikasi kesehatan maka kami selaku tim Program Keluarga Harapan langsung mengecek setiap sasaran yang sudah dituju yakni lembaga pendidikan setempat dan puskesmas setempat, apabila masih ada dari peserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Program Keluarga Harapan yang tidak menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh tim pelaksana maka akan diperingati secara lisan, dan apabila melanggar untuk yang kedua kalianya akan di beri surat peringatan, jika masih saja tidak mengindahkan dua proses tersebut, maka saya akan memberikan sanksi berupa denda. Menurut saya itu sangsi yang halus, namun warga akan berpikir dua kali jika mau melanggar aturan-aturan yang sudah kami buat.[61]

Dari hasil temuan data di lapangan tentang implementasi awal dengan cara mengirimkan surat pernyataan sebagai peserta Program Keluaga Harapan dan sosialisasi pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali, Tim pelaksana Program Keluarga Harapan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dilihat dari keberhasilan program dalam Program Keluarga Harapan terutama program verikasi pendidikan dan verifikasi kesehatan, peserta Program Keluarga Harapan sudah semakin sadar serta mengetahui bagaimana pentingya pendidikan serta pentingnya kesehatan untuk kehidupan yang lebih layak.

[61] Wawancara dengan Ibu Dhina Mardiana, S.H., M.KN (Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan) pada tanggal 13 Januri 2020 jam 07.42 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tidak sesuai aturan

Melalui informasi dari informan penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terdapat faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Program Keluarga Harapan tidak sesuai aturan, diantaranya :

1. Komunikasi yang tidak baik antara Dinas Sosial dengan Perangkat Desa terhadap Validasi Data Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman

Komunikasi merupakan suatu hal penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu program. Dalam Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, komunikasi menjadi penghambat yang membuat Program Keluarga Harapan tidak berjalan sesuai aturan.

Tidak terdapat komunikasi yang baik dalam Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terkait dengan pengelolaan data sasaran Program Keluarga Harapan. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Desa Betoyokauman, pendamping Program Keluarga Harapan Desa, Perangkat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Betoyokauman, RT dan RW hanya bisa merekomendasikan kepada Pemerintahan Pusat. Untuk Keputusan dan Ketetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan tetap berada di tangan Pemerintahan Pusat, karena semua pengelolaan data berasal dari Pemerintahan Pusat.

> "Tidak tepatnya sasaran dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan disebabkan karena kevalidan data yang tidak baik mbak, ketika bantuan tidak tepat sasaran ini adalah problematika Nasional, karena permasalahan ini berangkatnya bukan dari pendamping, sebenarnya permasalahan data kalau kita mau runtut data itu awalnya adalah dari desa sendiri, dari perangkat dari tingkatan bawah. Perangkat desa ini kalau sekarang kebijakannya melalui (Basic Data Terpadu) BDT ada musydes musykel, memang jujur kalau di Kabupaten Gresik updateing data untuk kemiskinan ini belum terupdate secara konsisten masih ada kendala-kendala yang harus kita perbaiki artinya data itu kalau kita fokus ke Kecamatan Manyar terutama Desa Betoyokauman yang tidak tepat sasaran kembali lagi data dari desa yang harus benar benar diperbaiki, kadang-kadang kan faktor leg dis leg ya saudaranya dimasukkan tidak mandang itu miskin atau tidak miskin tapi efeknya dari tim verifikasi (pendamping sosial) siapa pendamping soial, yang sekarang lagi naik daun adalah PKH jadi seakan-akan yang tidak paham soal data pendamping ini se'enaknya sendiri, padahal tidak. Kalau kita mau runtut data itu seluruhnya yang dari pusdatin adalah dari musydes musykel yang mana prosesnya melalui daerah kecamatan kabupaten pusat. Kemudian dari pusdatin kembali lagi ke VITI (Kementrian Sosial) nanti turun lagi ke pendamping bener tidak data yang di peroleh pusat data dan informasi dari musyawarah desa musyawarah kelurahan itu valid atau tidak, kalau tidak valid pendamping punya hak untuk mencoret. jadi pendamping punya tupoksi dia berhak untuk mencoret data-data yang memang dianggap sudah mampu itupun harus ada surat keterangan dari perangkat desa. Pendamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang punya hak seperti itu, karena itu memang tugasnya tapi untuk memasukkan atau menambahkan bukan kewenang dari temen temen pendamping dan bukan kewenangan dari dinas sosial, kewenangannya berjenjang yang sudah saya sebutkan ya harus melalui musyawarah desa musyawarah kelurahan terlebih dahulu."[62]

Pernyataan serupa dari bapak H.M. Ali Mansur :

"Jadi gini mbak, faktor yang menyebabkan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman ini tidak sesuai aturan salah satunya karena kevalidan data. Kebanyakan data yang ada di Betoyokauman ini masa expirednya sudah habis, jadi yang sekarang miskin itu tidak dapat. Karena kehidupan masyarakat di Desa Betoyokauman ini sudah ada perubahan, ada yang dulunya miskin sekarang bisa berubah menjadi berkecukupan (expired data kurang valid/kurang dicek lagi). Untuk Program Keluarga Harapan ini belum tersalurkan secara merata kepada masyarakat miskin Desa Betoyokauman karena kita hanya bisa mengusulkan, dan keputusan ada dipusat. Selanjutnya untuk kevalidan data yang lebih baik dari Perangkat Desa Betoyokauman melakukan tahapan penentuan peserta Program Keluarga Harapan memalui musyawarah desa yang dihadiri oleh toko masyarakat, perangkat dan semua BPD serta RT RW untuk mencari data terbaru warga yang seharusnya berhak memperoleh Program Keluarga Harapan"[63]

Dilihat dari hasil wawancara di atas antara Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan Kepala Desa Betoyokauman dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan Program Keluarga Harapan tidak sesuai aturan disebabkan oleh validasi

[62] Hasil wawancara dengan Ibu Diana Triratna Ningtyas, S.Psi (Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Gresik) Pada tanggal 13 Januari 2020 Pukul 09.28 di Kantor Dinas Sosial
[63] Hasil wawancara dengan bapak H.M. Ali Mansur (Kepala Desa Betoyokauman) Pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 08.26 di Kantor Kepala Desa Betoyokauman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang salah menjadikan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman tidak tepat sasaran, sehingga terdapat keluarga miskin dan rentan miskin yang belum menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan karena validasi data yang kurang maksimal.

2. Kurangnya controlling dari Dinas Sosial ke Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Controlling merupakan pengawasan yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu untuk mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya sebuah tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan controlling, seharusnya Dinas Sosial mengadakan pemeriksaan, mencocokan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang dicapai.

Tindakan controlling terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman yang dilakukan oleh staff atau anggota Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh pimpinan Program Keluarga Harapan. Tindakan controlling ini dilaksanakan untuk mengetahui atau mengecek apakah suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Keluarga Harapan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman mengalami beberapa kelemahan salah satunya yakni bantuan yang tidak tepat sasaran. Kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan masih ada yang berasal dari warga mampu dengan kondisi ekonomi ke atas.

Hal tersebut menjadi penyebab bahwa Program Keluarga Harapan menjadi tidak tepat sasaran antara lain karena pemerintah masih menggunakan data sensus penduduk yang masih belum diperbarui. Dalam hal ini petugas menjadikan masyarakat yang kurang mampu tidak memperoleh hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan.

Dinas Sosial diharapkan memberikan controlling yang lebih sungguh-sungguh agar penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

> "Menurut saya mbak, lebih enaknya dari pihak Dinas Sosial itu langsung mengontrol kebawah dan melihat situasi serta kondisinya masyarakat di lapangan. Jaman saya dulu, pertama mendapat program ini pada tahun 2008, saya ditanya langsung dari atasan waktu rumah saya masih kayu, suaminya bekerja apa, penghasilannya berapa, dan mereka melihat langsung rumah saya apakah itu rumah saya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri atau rumah ngontrak atau rumahnya orang tua serta dilihat kendaraan punya berapa. Jadi dari Dinas Sosial benar-benar mengetahui dirumah tersebut benar-benar mampu atau tidak. Soalnya kadang dari pihak Dinas Sosial tidak bakal mengetahi kondisi sesungguhnya dilapangan seperti apa kalau tidak mendatangi dan mensurvei lokasi yang dituju. Ada juga yang tidak mampu tidak memperoleh dan yang mampu justru mendapatkan Program Keluarga Harapan.

La kalau menurut saya ya mending dari Dinas Sosial itu langsung turun kebawah melihat keadaan dan mengecek kembali siapa saja yang sudah memperoleh Program Keluarga Harapan apakah sudah layak mendapatkan atau tidak. Kalau dulu memang benar-benar dicek dan dilihat bagaimana realnya dilapangan, tapi kalau sekarang itu tidak dicek sama sekali dan tidak ada dari Dinas Sosial mendatangi kerumah penerima Program Keluarga untuk memastikan orang ini apakah benar-benar layak mendapatkan Program Keluarga Harapan atau tidak, jadi dari pihak Dinas Sosial tidak akan mengetahui keadaan semestinya. Karena keadaan dari tahun ke tahun kan mesti berubah-ubah ya mbak, setiap orang kan ada saja yang habis miskin menjadi kaya, habis kaya perekonomiannya menurun juga ada, habis mendapatkan warisan jadi makmur setelah warisannya habis sekarang menjadi pas-pasan juga ada. Enaknya juga itu tadi mbak, didatangi oleh Dinas Sosial kerumah-rumah jadi mesti mengetahui bagaimana keadaan rumahnya, pekerjaannya, berhak atau tidak berhak memperoleh Program Keluarga Harapan kan dari Dinas Sosial jadi mengetahui.

Jadi implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman ini butuh controlling dari Dinas Sosial yang mengkoordinir Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman.[64]

Dilihat dari hasil wawancara di atas dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga

[64] Hasil wawancara dengan Ibu Muya (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 18 Januari 2020 Pukul 16.45 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harapan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan Program Keluarga Harapan tidak sesuai aturan yakni disebabkan oleh kurangnya controlling dari Dinas Sosial ke Desa Betoyokauman sehingga menyebabkan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman tidak tepat sasaran.

Dampak Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

1. **Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak**

   Dampak positif yang ada di Desa Betoyokauman sebelum dijalankannya Program Keluarga Harapan, bisa dilihat dari segi perekonomian masyarakat Desa Betoyokauman, sebelum ditetapkannya Program Keluarga Harapan perekonomian masyarakat Desa Betoyokauman yang relatif menengah kebawah membuat masyarakat sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Setelah dijalankannya Program Keluarga Harapan ini masyarakat bisa memaksimalkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya.

   > "Saya sangat senang mbak ketika saya masuk daftar dalam peserta Program Keluarga Harapan, sangat bersyukur juga karena ketika dana dari Program Keluarga Harapan sudah cair saya bisa melunasi pembayaran anak-anak sekolah dengan rutin, bisa mengajak anak-anak saya berobat secara langsung kalau anak-anak saya lagi sakit, dan bisa dibuat kebutuhan-kebutuhan lainnya juga. Dan dana dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Program Keluarga harapan tersebut akan saya gunakan dengan semestinya, karena memang mendapatkan dana dari Program Keluarga Harapan ini harus digunakan semestinya sesuai komponen. Untuk kebutuhan pendidikan, dana ini saya jagakan untuk biaya kesehatan serta salah satu sumber perekonomian di kebutuhan saya sehari-hari. Karena jika nanti kalau dana tersebut tidak saya gunakan dengan semestinya, saya takut akan dicabut nama saya di daftar penerima Program Keluarga Harapan. Memang benar harus untuk komponen kesehatan dan komponen pendidikan, dan nanti kalau tidak diturut ya saya tidak memenuhi tata tertibnya Program Keluarga Harapan."[65]

Dari pihak perangkat desa Betoyokauman menyatakan keterlibatannya langsung dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan :

> "Setelah adanya Program Keluarga Harapan ini mbak, perubahan masyarakat desa Betoyokauman semakin baik, dilihat dari perubahan dalam segi perekonomian maupun segi kesehatannya, yang mana bisa merawat keluarganya dengan baik yang awalnya gizi buruk jadi bisa teratasi dengan adanya dana dari implementasi Program Keluarga Harapan, bukan hanya itu saja peserta Program Keluarga Harapan bisa melunasi SPP anak-anaknya dengan rutin setiap bulannya."[66]

Dilihat dari hasil wawancara dengan berbagai macam pelaksana maupun penerima kebijakan dirasa Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari Program Keluarga Harapan yakni diantaranya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat

[65] Hasil wawancara dengan Ibu Muya (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 14.28 di rumahnya

[66] Hasil wawancara dengan bapak Husnul Wafa (Bidang Kesejahteraan) Pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 08.15 di Kantor Kepala Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

2. **Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana**

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Indonesia terutama di Desa Betoyokauman, maka dari itu Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat Program Keluarga Harapan yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Dalam Program Keluarga Harapan, terdapat berbagai macam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi maupun bidang pendidikan.

> "Kalau tingkat kemiskinan di Desa kita berkurang berarti Desa Betoyokauman ini maju, dan saya berharap kemiskinan di Desa Betoyokauman ini bisa berkurang nantinya, jadi warga miskin di Desa Betoyokauman ini bisa teratasi dengan baik yakni salah satunya dengan adanya Program Keluarga Harapan, dan setelah itu saya berharap semakin tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat kemiskinan di Desa Betoyokauman ini semakin berkurang."[67]

Dengan pernyataan tersebut, selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Perangakat Desa Betoyokauman selaku Bidang Kesejahteraan Desa tentang Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan :

> "Semenjak adanya Program Keluarga Harapan, kemiskinan di Desa Betoyokauman ini sedikiti demi sedikit bisa teratasi, namun diharapkan Program ini bisa merata terutama pemerataan dalam pengimplementasian dan tepat sasaran, yang miskin mendapatkan dengan sebagaimana mestinya sedangkan yang kaya tidak mendapatkan karena masyarakat menengah ke atas tidak berhak mendapatkan dari implementasi Program Keluarga Harapan."[68]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bisa dilihat bahwa harapan dari perangkat Desa Betoyokauman terhadap Program Keluarga Harapan terutama yang ada di Desa Betoyokauman ini bisa mengurangi angka kemiskinan di Desa.

3. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Banyak upaya yang akan dilakukan oleh Tim Program Keluarga Harapan. Diantaranya yaitu memverikasi ulang data tentang kemiskinan Desa Betoyokauman mengenai

[67] Hasil wawancara dengan bapak H.M. Ali Mansur (Kepala Desa Betoyokauman) Pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 08.46 di Kantor Kepala Desa Betoyokauman
[68] Hasil wawancara dengan bapak Husnul Wafa (Bidang Kesejahteraan) Pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 08.14 di Kantor Kepala Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran dan kelayakan masyarakat sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

> "Upaya yang dilakukan oleh tim pelaksana Program Keluarga Harapan dalam memperbaiki sistem layanan terhadap masyarakat yang tidak memperoleh Program Keluarga Harapan sedangkan mereka masuk dalam komponen yang sudah ditetapkan yakni salah satunya dengan cara berjenjang mbak, ada yang melalui musyawarah desa untuk dimasukkan dalam data BDT (basic data terpadu) atau DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), dengan cara ini semua masyarakat miskin yang belum tercover bantuan sosial apapun mau itu BPNT, KIP, KIS atau Program Keluarga Harapan Itu semua harus masuk dalam data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yang awalnya dari musyawarah desa dengan cara berjenjang itu tadi mbak (awalnya dari desa, pendaftaran dari desa dan bisa dikawal oleh temen-temen pendamping Program Keluarga Harapan Desa)."[69]

Dari Peserta Program Keluarga Harapan juga memberikan pernyataannya mengenai upaya yang seharusnya dilakukan oleh tim Program Keluarga Harapan agar sesuai dengan ketetapan Permensos No. 1 Tahun 2018.

> "Kalau menurut saya mending yang pusat itu langsung turun kebawah melihat keadaan dan mengecek kembali siapa saja yang sudah memperoleh Program Keluarga Harapan apakah sudah layak mendapatkan atau tidak. Kalau dulu memang benar-benar dicek dan dilihat bagaimana realnya dilapangan, tapi kalau sekarang itu tidak dicek sama sekali dan tidak ada dari pusat mendatangi kerumah penerima Program Keluarga untuk memastikan orang ini apakah benar-benar layak mendapatkan Program Keluarga Harapan atau tidak, jadi dari pihak pusat tidak akan mengetahui keadaan semestinya. Karena

[69] Hasil wawancara dengan Ibu Diana Triratna Ningtyas, S.Psi (Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Gresik) Pada tanggal 13 Januari 2020 Pukul 09.27 di Kantor Dinas Sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan dari tahun ke tahun kan mesti berubah-ubah ya mbak, setiap orang kan ada saja yang habis miskin menjadi kaya, habis kaya perekonomiannya menurun juga ada, habis mendapatkan warisan jadi makmur setelah warisannya habis sekarang menjadi pas-pasan juga ada. Enaknya ya itu tadi mbak, didatangi oleh pihak pusat kerumah-rumah jadi mesti mengetahui bagaimana keadaan rumahnya, pekerjaannya, berhak atau tidak berhak memperoleh Program Keluarga Harapan kan pihak pusat jadi mengetahui."[70]

Dari pernyataan di atas maka tahap implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman ini butuh controling dari pihak pusat yang mengkoordinir Program Keluarga Harapan terutama di Desa Betoyokauman, agar nantinya Program Keluarga Harapan benar-benar bisa terealisasikan dengan maksimal sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

[70] Hasil wawancara dengan Ibu Muya (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 14.22 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap suatu program pembangunan dianggap sebagai sesuatu yang berperan terhadap keberhasilan program. Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari penilaian masyarakat itu sendiri, karena penilaian merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang.

Manusia tidak akan lepas dari kegiatan penilaian. Penilaian dalam penelitian ini mengenai penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman sejak tahun 2008 ini menciptakan pengalaman tersendiri bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Pengalaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama mengikuti Program Keluarga Harapan selama ini pada akhirnya menciptakan sebuah penilaian terhadap Program Keluarga Harapan. Penilaian setiap Keluarga Penerima Manfaat tentang Program Keluarga Harapan akan berbeda-beda,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada baik buruknya pengalaman mereka sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

Pertama, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan merasakan kenyamanan serta ketenangan setelah mendapatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan ini. Masyarakat Desa Betoyokauman merasa senang karena Program Keluarga Harapan dirasakan membantu dari segi ekonomi, segi finansial maupun dari segi perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan para anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang merupakan keluarga ekonomi lemah, merasa sangat terbantu dari segi finansial setelah menjadi peserta Program Keluarga Harapan.

> "Alhamdulillah perekonomian saya sangat terbantu mbak dengan adanya Program Keluarga Harapan yang telah berjalan di Desa Betoyokauman ini. Meskipun nominalnya tidak terlalu banyak, tapi semua nominal itu sudah sangat membantu perekonomian di keluarga saya."[71]

Tidak hanya dari segi finansial, peserta dari Program Keluarga Harapan juga merasakan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman ini sangat memperhatikan dalam segi pendidikan dan kesehatan dari anak-anak peserta Program Keluarga Harapan serta kesejahteraan sosial masyarakat Desa

[71] Hasil wawancara dengan Ibu Ninik Zulaikha (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 29 Januari 2020 Pukul 20.14 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Betoyokauman. Sebelumnya, beberapa anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan sangat malas untuk pergi ke sekolah dan selalu mencari alasan untuk tidak masuk sekolah, bahkan ada yang sempat tidak sekolah karena terkendala biaya dalam pendidikan. Namun setelah mendapatkan Program Keluarga Harapan masalah-masalah tersebut sedikit demi sedikit bisa teratasi, anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan menjadi ingin bersekolah dan bahkan lebih rajin ke sekolah.

> "Anak saya itu mbak, dulu sebelum adanya Program Keluarga Harapan susah sekali kalau disuruh berangkat sekolah, dan setelah adanya Program Keluarga Harapan ini saya harus pinter-pinter membujuk anak saya untuk mau berangkat sekolah, karena kalau tidak begitu saya takut nama saya akan dicabut dalam daftar Program Keluarga Harapan ini. Meski awalnya masih harus disuruh-suruh, alhamdulillah mbak lama kelamaan jadi terbiasa, dan saya tidak perlu nyuruh lagi ketika anak-anak berangkat sekolah."[72]

Pada awalnya, anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan rajin untuk berangkat sekolah karena takut bantuannya terpotong, tetapi setelah beberapa tahun pelaksanaan Program Keluarga Harapan timbullah kesadaran anak-anak dari Peserta Program Keluarga Harapan akan pentingnya pendidikan dan kesehatan.

[72] Hasil wawancara dengan Ibu Sulaturrohmi (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 30 Januari 2020 Pukul 11.07 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan merasakan potensi dari kegiatan Program Keluarga Harapan yang dapat memberikan kesadaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya. Kegiatan pertemuan kelompok atau sosialisasi yang dilakukan diisi dengan berbagai macam materi-materi yang berbeda di setiap pertemuannya, diantaranya materi pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, materi cara pintar mengasuh anak dirumah, materi pintar dalam mengatur penggunaan uang keluarga, materi dalam mendukung pendidikan anak, materi dalam membangun usaha dengan keterampilan yang ada, serta materi tips menjadi orang tua yang hebat.

Pemberian materi-materi oleh pendamping pada saat pendampingan biasa disebut dengan istilah penyuluhan atau sosialisasi Program Keluarga Harapan.

> "Setelah mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh pendamping itu. Saya jadi lebih memahami mbak jadi bagaimana pentingnya segi pendidikan untuk anak-anak saya, bukan hanya itu saja yang paling bisa membuat saya sadar itu ketika materi cara pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, dari situ saya mulai mengatur keuangan setiap harinya kemudian keterampilan yang saya miliki itu akan saya terapkan untuk membangun usaha di keluarga saya seperti menjahit itu mbak."[73]

[73] Hasil wawancara dengan Ibu Ninik Zulaikha (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 29 Januari 2020 Pukul 20.19 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pendapat tersebut dapat terlihat bahwa secara tidak langsung pemberian materi dalam sosialisasi dan pertemuan kelompok yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan dapat mempengaruhi kesadaran serta wawasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan akan pentingnya segi pendidikan dan segi pengelolaan keuangan dalam berkeluarga.

Penyuluhan atau sosialisasi Program Keluarga Harapan merupakan suatu kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh pendamping untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek-aspek dalam kehidupan. Dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi Program Keluarga Harapan ini menjadi bernilai, dimana peserta Program Keluarga Harapan diajarkan dan dibekali oleh pendamping tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, serta cara mengasuh anak. Peserta Program Keluarga Harapan yang sudah menerima materi dalam sosialisasi Program Keluarga Harapan dari pendamping akan lebih memiliki wawasan yang luas mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan kesehatan ibu hamil serta balita.

Ketiga, adanya unsur keteraturan aktivitas pada kegiatan Program Keluarga Harapan yang dirasakan oleh peserta Program Keluarga Harapan yang menunjukkan pengendalian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat pertemuan kelompok, pendamping sering memberikan nasihat tentang penggunaan dana bantuan. Cara penyampaian yang tegas serta seringnya pemberian nasihat tentang penggunaan dana bantuan membuat peserta Program Keluarga Harapan merasa takut dan cemas jika menyalahgunakan dana bantuan. Peserta Program Keluarga Harapan merasa takut jika dana bantuan akan dicabut dan nama tidak lagi masuk dalam daftar kepesertaannya sebagai peserta Program Keluarga Harapan jika tidak menggunakan dana bantuan untuk keperluan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

> "Memang mbak, kadang cara menyampaikan tentang cara penggunaan dana bantuan itu sedikit mengancam, dan ancaman itu berupa akan mencabut dana bantuan dari peserta Program Keluarga Harapan yang tidak menggunakan dana tersebut sesuai komponen yang telah ditentukan. Oleh karena itu, saya juga takut mbak jika tidak menggunakan dana dari Program Keluarga Harapan tersebut dengan sebaik-baiknya."[74]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bisa dilihat bahwa secara keseluruhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selaku masyarakat penerima dana bantuan memiliki penilaian yang positif tentang Program Keluarga Harapan.

[74] Hasil wawancara dengan Ibu Muya (Peserta Program Keluarga Harapan) Pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 14.24 di rumahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik oleh Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan. Diantara program yang sudah terlaksana sesuai dengan tahapan Implementasi yaitu : Tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksana keputusan oleh instansi pelaksana, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki mapun tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan intansi pelaksana, serta upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

   Berdasarkan tahapan implementasi tersebut, Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mendapat tanggapan dari sebagian besar masyarakat yang menyatakan baik. Meskipun terdapat beberapa kendala, namun tidak begitu besar dan masih dapat ditemukan solusinya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai dengan aturan yakni dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya : Komunikasi yang tidak baik antara Dinas Sosial dengan Perangkat Desa terhadap Validasi Data Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman serta kurangnya controlling dari Dinas Sosial ke Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Dari kedua faktor tersebut, menyebabkan Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman tidak tepat sasaran dan masih belum bisa terealisasikan dengan maksimal sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

3. Penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman yakni bisa dilihat bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan memiliki penilaian yang positif tentang Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman. Hal ini dapat dilihat dari kenyamanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah menjadi peserta Program Keluarga Harapan dan perubahan yang dirasakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Program Keluarga Harapan merupakan program Kementrian Sosial yang telah terbukti berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu Program Keluarga Harapan seharusnya ditujukan khusus untuk masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk bantuan bersyarat. Sesuai dengan ketentuan Peratuan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.
2. Alangkah lebih baiknya pendataan menggunakan data yang terbaru dengan melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang tergolong sebagai keluarga sangat miskin melalui kerja sama antara Dinas Sosial dengan Perangkat Desa Betoyokauman untuk memperoleh data terbaru masyarakat Desa Betoyokauman, karena data dinilai tidak valid apabila berpegang dengan data tahun-tahun sebelumnya.
3. Dinas sosial seharusnya perlu melakukan turun lapangan untuk mengontrol sasaran Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman, supaya dari Dinas Sosial mengetahui situasi serta kondisi masyarakat sesungguhnya di lapangan sehingga tidak terjadi faktor yang menyebabkan Program Keluarga Harapan tidak sesuai aturan.
4. Bagi Dinas Sosial dan Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan untuk lebih memperhatikan terhadap Program Keluarga Harapan yang sudah berjalan ini. Supaya Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman bisa berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *"Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan"*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Deddy Mulyadi. 2015. "*Studi kebijakan publik dan pelayanan publik"*. Bandung: Alfabeta

Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.A. 2012 *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan.* UIN-Maliki Press

Data Arsip Jumlah Penduduk Desa Betoyokauman. Tahun 2019

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika

Herdiansyah, Haris. 2010. *"Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu- Ilmu Sosial"*. (Jakarta : Salemba Humanika)

Isbandi Rukminto Adi. 2013. "*Kesejahteraan Sosial*", Jakarta: Rajawali Pers

Idrus, Muhammad. 2009. *"Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif"*. (Jakarta : Erlangga)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. *Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka

Kartasasmita. 1996. "*Pembangunan Untuk Rakyat*". Jakarta: Pustaka CIDESINDO

Lexy J. Maleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja

Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya

Muh. Khalifah Mustamin, M.pd. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Makasaar: Alauddin Press

Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A. 2017. *"Analisis Kebijakan"*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development.* Bandung: Alfabeta

Tatang Amirin. 1998. *"Menyusun Rencana Penelitian"*. Jakarta: Raja Grafindo

Wayne Parsons. 2001. "*Public Policy*: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan". Jakarta: Prenadamedia Group

Wisadirana, Darsono. 2005. *Metode Penelitian & Pedoman Penulisan Skripsi :Untuk Ilmu Sosial,* (Malang: UMM Press)

SKRIPSI

Faizal. 2015. "*Diskursus Pemberdayaan Masyarakat"*, Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung. Volume 8 No. 1

Haedar Akib.2010. *"Implementasi Kebijakan",* Guru besar ilmu administrasi Universitas Negeri Makassar. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1

Helliyah. 2014. dengan judul skripsi *"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Masuk Sekolah Di SDN Pajeruan 4 Kec. Kedungdung Kab. Sampang"."*, Skripsi jurusan kependidikan islam, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, IAIN Sunan Ampel

Iqbal Nugraha. 2018. dengan judul skripsi "*Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur"*, Skripsi jurusan Ilmu Pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Lampung Bandar Lampung

Meilis Alfista. 2019. "*Analisis Tingkat Kemiskinan di Indoneisa"*, Skripsi jurusan ekonomi pembangunan, fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nurfahira Syamsir. 2014. dengan judul skripsi "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar"*, Skripsi jurusan ilmu administrasi program studi administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Hasanuddin

Nurdiana. 2017. dengan judul skripsi "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa"*, Skripsi jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, fakultas dakwah dan kounikasi, UIN Alauddin Makassar

Nano Prawoto. 2009. "*Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya"*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 No. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sri Widayanti. 2012. "*Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis"*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 1 No. 1

Suradi. 2007. "*Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial*". Nusa Tenggara Barat. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03

Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani. 2016. "*Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik"*. Jurnal Review Politik. Volume 6 No.2

WEBSITE

Https://www.ayoksinau.com/pengertian-program-menurut-para-ahli-lengkap/ di akses pada 02 Oktober 2019 pukul 13.53

Https://www.romadecade.org/pengertian-observasi/ di akses pada 12 Oktober 2019 pukul 22.47

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id